

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG BANTAR
DI KELURAHAN TELANAIPURA KECAMATAN
TELANAIPURA KOTA JAMBI**

SKRIPSI



Diajukan Sebagai Upaya Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Hukum
Universitas Jambi

Oleh

Sella Alvianika P

NIM : H1A117038

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JAMBI

JAMBI

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG BANTAR DI KELURAHAN TELANAIPURA KECAMATAN TELANAIPURA KOTA JAMBI

**(Studi Kasus Pemerintah Kota Jambi dan Masyarakat di Kelurahan
Telanaipura)**

Nama : Sella Alvianika P

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

NIM : H1A117038

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing 1 dan Dosen Pembimbing 2 untuk
diajukan ke Sidang Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum
Universitas Jambi

Jambi, 06 Juni 2024

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2

RIO USRI MAULANA, S.IP., M.I.POL., PH.D.

NIP. 199306092018031001

CITRA DARMINO, S.IP., M.MP

NIP. 198205092024211001

LEMBAR PENGESAHAN

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG BANTAR DI KELURAHAN TELANAIPURA KECAMATAN TELANAIPURA KOTA JAMBI

Nama : Sella Alvianika P
NIM : H1A117038
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Hukum

Skripsi ini telah di uji dan dipertahankan di hadapan Dewan
Penguji Sidang Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jambi, 24 Juni 2024

Dewan Penguji Sidang Skripsi

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Alva Beriansah, S.IP., M.IP	Penguji Pertama	1. _____
2	Rio Yusri Maulana, S.IP., M.I.Pol., P.Hd.	Pembahas Utama	2. _____
3	Citra Darminto, S.IP., M.MP	Penguji Kedua	3. _____

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi

Dr. Usman, S.H., M.H.

NIP. 1964050319900310

LEMBAR PERSEMBAHAN

Karya kecil ini saya persembahkan untuk cahaya hidup saya yaitu Ibu (Rukiyah) dan Ayah (Alfian) yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu setia mendampingi dan memanjatkan doa dalam setiap sujudnya, mengharapkan segala hal hal baik di kehidupan saya. Terima kasih untuk semuanya semoga kedepannya semakin banyak hal hal baik juga yang datang kepada ibu dan ayah.

Sebagai bentuk terima kasih teman saya di rumah yang tidak lain adalah adik adik saya (Jingga dan Hafiza), saya persembahkan pula karya kecil ini untuk mereka. Terima kasih telah memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga doa dan semua hal yang terbaik yang engkau berikan menjadikan ku orang yang baik pula.. Terima kasih...

Teruntuk teman temanku dan orang terkasih yang selalu berada di sekitarku, tanpa semangat, dukungan, dan do'a kalian semua tak akan mungkin aku sampai di tahap ini, terimakasih untuk canda tawa, tangis dan bantuan baik waktu maupun materi yang telah kalian beri dengan tujuan agar aku dapat optimis Kembali menyelesaikan kewajibanku ini. Terima kasih untuk Mas Ari, Bang Ardy, Ayu, Yuni, Iqbal, Byan, Handika, Noval, Witri, Feri dan teman teman ilmu pemerintahan 2017 lainnya. Terima kasih telah ada dan memberikan banyak pengalaman penting selama ini...

Bapak Rio Yusri Maulana, S.IP., M.I.Pol., P.Hd. dan Citra Darminto, S.IP., M.MP Bapak sebagai dosen pembimbing skripsi saya, dan terima kasih pula untuk Bapak Alva Beriansyah, S.IP., M.IP. selaku penguji saya. Terima kasih banyak sudah membantu saya selama ini, telah memberikan nasihat, semangat, motivasi, dan arahan agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

LEMBAR MOTTO

“Yakin adalah kunci jawaban dari segala permasalahan, karena yakin adalah obat mujarab penumbuh semangat hidup.”

SURAT PERNYATAAN

Nama : Sella Alvianika P

NIM : H1A117038

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Judul : Evaluasi Pelaksanaan Program Kampung Bantar Di Kelurahan
Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi

Alamat : Jl. Tarumanegara Rt.14 Lorong Remba Kota Jambi

No.HP : 089694608300

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dan dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penciptaan (plagiarisme) dari hasil karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik Universitas Jambi ataupun perguruan tinggi lain.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya ataupun pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam kepustakaan.
3. Pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 06 Juni 2024

Yang membuat pernyataan

Sella Alvianika P

Nim.H1A117038

Intisari

Kota Jambi diberikan otonomi daerah melalui Program Kampung Bantar yang memungkinkannya berkembang sesuai potensi dan kemampuannya. Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2019 yang memuat standar teknis penciptaan dan penilaian Kelurahan bersih, aman, dan cerdas di Kota Jambi mengatur program ini. Pemerintah Kota Jambi berkomitmen menjalankan Program Kampung Bantar guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Baik masyarakat maupun pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjaga taraf hidup di daerahnya. RT.04 Kelurahan Telanaipura sudah masuk dalam program Kampung Bantar. Namun wilayah ini belum pernah memenangi perlombaan tersebut selama keikutsertaan dari tahun 2016 sampai tahun 2022. Interaksi sosial terhambat oleh padatnya penduduk dan sedikitnya wilayah. Kurangnya sosialisasi inilah yang menjadi penyebab ketidaktahuan tersebut. Rencana Kampung Bantar (bersih, aman, cerdas) belum sepenuhnya diterapkan di seluruh kecamatan dan RT Kota Jambi, menurut Pemerintah Kota Jambi. Kendala pelaksanaan program Kampung Bantar (Bersih, Aman, Pintar) di RT.04 Kelurahan Telanaipura meliputi adalah Tingkat keterlibatan masyarakat masih rendah karena kurangnya sosialisasi dan teguran dan Anggaran Kampung Bantar terkendala.

Kata Kunci: Evaluasi, Program Kampung Bantar

ABSTRACT

The city of Jambi was given regional autonomy through the Bantar Village Program which allows it to develop according to its potential and capabilities. Jambi Mayor Regulation Number 11 of 2019 which contains technical standards for the creation and assessment of clean, safe and smart villages in Jambi City regulates this program. The Jambi City Government is committed to implementing the Bantar Village Program to improve the quality of life of the community. Both the community and local government have a responsibility to maintain the standard of living in their area. RT.04 Telanaipura Village has been included in the Bantar Village program. However, this region has never won the competition during participation from 2016 to 2022. Social interaction is hampered by dense population and small areas. This lack of socialization is the cause of this ignorance. The Bantar Village Plan (clean, safe, smart) has not been fully implemented in all Jambi City sub-districts and RTs, according to the Jambi City Government. Obstacles in implementing the Bantar Village (Clean, Safe, Smart) program in RT.04 Telanaipura Subdistrict include the level of community involvement which is still low due to a lack of socialization and warnings and the Bantar Village budget is constrained.

Keywords: Evaluation, Bantar Village Program

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Rabb semesta alam, pendidik dan pengajar manusia terhadap semua ilmu yang tidak diketahui-Nya. Atas Ridho dan kehendak-Nyalah skripsi ini dapat diselesaikan, yang penulis beri judul **“Evaluasi Pelaksanaan Program Kampung Bantar Dikelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi”** tanpa petunjuknya tidak ada satu patah kata pun dapat tersajikan.

Dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bantuan moril maupun materil. Atas dasar demikian, penulis menghaturkan terima kasih atas kontribusi besar Bapak Rio Yusri Maulana, S.IP., M.IPol., Ph.D. dan Bapak Citra Darminto, S.IP., M.MP yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran sejak awal penyusunan skripsi ini dan senantiasa memberikan motivasi, kritik, serta arahan kepada penulis.

Disamping itu, dalam kesempatan ini dengan setulus hati penulis menyampaikan terima kasih pula kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc., Ph.D., Rektor Universitas Jambi telah memberi kesempatan penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Jambi.
2. Bapak Dr. Usman, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Ja yang memberikan kemudahan dalam pengurusan izin penelitian guna kelancaran penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Muskibah, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerja Sama, dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah

banyak memberikan bantuan dalam administrasi akademik selama proses perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

4. Bapak Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu kelancaran finansial di Fakultas Hukum sehingga kegiatan belajar mengajar dapat terselenggara dengan baik.
5. Bapak Dr. A. Zarkasi, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dan memberikan kelancaran atas segala urusan kegiatan mahasiswa.
6. Bapak Dr. Arfa'I, S.H., M.H., Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak M. Yusuf, S.Sos., M.I.P, Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Alva Beriansah, S.IP., M.IP. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan banyak bantuan dalam proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi.
9. Ibu Rahau Repindowaty Harahap, S.H., LL.M, Pembimbing Akademik yang telah senantiasa memberikan bimbingan serta nasihat kepada penulis selama menjalani perkuliahan.

10. Bapak Alva Beriansah, S.IP., M.IP. Penguji Utama yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan masukan bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

11. Seluruh Dosen, Tenaga Pengajar serta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan banyak ilmu bermanfaat bagi penulisserta telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal administrasi

12. Kepada rekan-rekan penulis yang telah banyak membantu penulis, baik itu dari segi moral maupun materil hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis mengharapkan saran dan kritiknya untuk penyempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat

Jambi, 06 Juni 2024
Penulis

Sella Alvianika P
H1A117038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
LEMBAR MOTTO	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Manfaat Penelitian	13
1.5. Landasan Teori	14
1.5.1 Kebijakan Publik.....	14
1.5.2 Konsep Evaluasi.....	18
1.6. Kerangka Pikir	21
1.7. Metode Penelitian	22
1.7.1 Jenis Penelitian.....	22
1.7.2 Fokus Penelitian.....	22
1.7.3 Lokasi Penelitian.....	22
1.7.4 Sumber Data	23
1.7.5 Teknik Penentuan Informan	24
1.7.6 Teknik Pengumpulan Data	25
1.7.7 Teknik Analisis Data	26
1.7.8 Keabsahan Data/Triangulasi	28
BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN	
2.1. Kondisi Geografis Kota Jambi	29
2.2. Kondisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	30
2.3. Letak Geografis Kelurahan Telanai	31
2.4. Struktur Pemerintahan Kelurahan Telanai	32
2.5. Profil Rt.04 Kelurahan Telanaipura	39

BAB III HASIL PENELITIAN

3.1. Evaluasi Program Kampung Banar Di Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi	43
3.1.1 Penyusunan Tujuan Program Kampung Bantar	43
3.1.2 Dasar Hukum Program Dan Pendamping Kampung Bantar RT. 04 dan RT. 05.....	45
3.2. Kendala Dalam Pelaksanaan Kampung Bantar Di Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi	58
3.2.1 Partisipasi Warga	58
3.2.2 Anggaran Kampung Bantar	59

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan.....	61
4.2. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA	63
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	65
-----------------------	-----------

CURICULUM VITAE	67
------------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya, pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang dilimpahkan kepadanya oleh pemerintah pusat melalui desentralisasi, dekonsentrasi, dan bantuan. Penerapan dekonsentrasi dan desentralisasi menandakan adanya pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam suatu negara kesatuan. Dengan demikian, pemerintah daerah mendapat kewenangan atas hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah pusat.

Struktur pemerintahan nasional mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014. Modifikasi sistem pemerintahan nasional tercermin dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan. Ide-ide awal yang tersentralisasi digantikan oleh ide-ide yang terdesentralisasi dengan disahkannya Undang-undang ini.¹ Daerah provinsi dan kabupaten/kota kini mempunyai tanggung jawab pemerintahan yang berbeda sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014, khususnya Undang-Undang Nomor 23. Menegakan dan menegakkan ketentraman dan ketertiban

¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

masyarakat merupakan salah satu tugas pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kabupaten/Kota.²

Proses urbanisasi mempengaruhi penghidupan masyarakat dalam berbagai cara, baik dampak positif maupun negatif. Saat ini, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan menjadi fokus utama pertumbuhan perkotaan di Indonesia, terutama di kota-kota seperti Jakarta dan Surabaya. Hal ini melibatkan pembangunan lingkungan kelas atas, kawasan bisnis, gedung perkantoran, dan fasilitas rekreasi modern. Meskipun demikian, masih terdapat keterbatasan yang signifikan terhadap kemampuan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dan fasilitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti perumahan yang layak dan terjangkau serta pengembangan daerah tertinggal.

Tata guna lahan dan pengelolaan pembangunan perkotaan pada hakikatnya saling terkait, dan pengelolaan pertumbuhan perkotaan harus selalu selaras dengan rencana tata ruang wilayah yang dinamis dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Tujuannya adalah membangun kota yang sukses, layak huni, berkeadilan sosial, dan berkelanjutan sekaligus mendorong pertumbuhan regional yang seimbang dan harmonis. Untuk mencapai tujuan tersebut, semua pihak yang terlibat harus bekerja sama.

Kota Jambi telah berkembang menjadi pusat industri, jasa, dan perdagangan. Industri ini menonjol dalam perekonomian lokal karena potensi lapangan kerja yang

² Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

besar. Ibu kota Provinsi Jambi adalah Kota Jambi yang terletak di Indonesia. Secara geografis, Sungai Batanghari membelah Kota Jambi menjadi dua, dan Jembatan Aur Duri menghubungkan kedua bagian tersebut. Dengan luas daratan kurang lebih 204,38 kilometer persegi, Kota Jambi dihuni oleh 610.854 jiwa.³

Motto Kota Jambi adalah “Tanah Pilih Pesako Betuah”. Secara filosofis, Kota Jambi merupakan inti sosial, ekonomi, dan budaya yang utama selain berperan sebagai pusat pemerintahan kota. Ini mewakili semangat komunitas masyarakatnya, yang berfungsi sebagai utusan keharmonisan bagi individu, keluarga, dan organisasi. Selain itu, Kota Jambi menghormati dan berpegang teguh pada norma-norma daerah, hukum adat, dan peraturan perundang-undangan terkait baik secara kelembagaan maupun pribadi.

Sesuai dengan rencana kebijakan daerah Provinsi Jambi, Kota Jambi berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Nasional (PKN). Kota Jambi memerlukan infrastruktur dan layanan perkotaan dengan intensitas tinggi, termasuk listrik, air bersih, sistem pembuangan limbah, pembuangan air limbah, dan jaringan telekomunikasi, karena kota ini tergolong sebagai pusat kegiatan sekunder dan tersier.

Peraturan yang dikenal dengan PERWAL Nomor 11 Tahun 2019 yang berisi petunjuk teknis penciptaan dan pengkajian Kelurahan bersih, aman, dan cerdas di Kota Jambi diumumkan oleh pemerintah kota. Proyek inisiatif ini berupaya untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan kesejahteraan serta

³ <https://bpsjambi.com> dikunjungi tanggal 15 Februari 2021

kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan mempercepat pembangunan, tata kelola, dan pertumbuhan sosial Kota Jambi. Aturan ini bertujuan untuk memfasilitasi pembentukan perusahaan mandiri dalam kelompok masyarakat, mendorong pemerataan pembangunan, dan mempercepat pembangunan kecamatan. Selain itu, semangat gotong royong dan gotong royong dalam masyarakat diharapkan dapat ditumbuhkan melalui norma-norma tersebut. Terciptanya iklim persaingan yang positif antar Kelurahan dalam kelurahan dan kelurahan dalam Kota Jambi adalah tujuan akhirnya. Program ini telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Jambi.

Program ini telah menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Paal Merah, di mana partisipasi masyarakat dan pemuda sangat tinggi. Hal ini terlihat dari peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup warga yang terlibat dalam program ini sejak 2014.

Pada tahun 2014, Program Kampung Bantar diluncurkan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi meluncurkan kegiatan sosialisasi, dan warga sekitar (RT) meresponsnya. Itu adalah proses yang mudah. Setelah itu, RT mengajukan menjadi Kampung Bantar dengan mendaftarkan secara sah ke kecamatan. Kecamatan tersebut selanjutnya menjadi Kampung Bantar dengan mendaftar pada Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Perempuan dan Anak. Singkatnya, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan program menuju Kampung Bantar. Satu-satunya organisasi yang memberikan arahan kampanye ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi. Hanya tiga Teknisi Tetap (RT) yang berpartisipasi ketika program ini dimulai

pada tahun 2014; ketiga RT ini berlokasi di Kecamatan Danau Sipin, Danau Teluk, dan Paal Merah. Ketika layanan ini pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat, anggapan umum bahwa layanan ini kekurangan dana, sehingga tidak menghasilkan banyak minat. Proyek ini secara eksklusif memberikan tindakan yang dimaksudkan untuk melindungi lingkungan masyarakat lokal sesuai dengan tiga indikator program—Bersih, Aman, dan Cerdas.

Pemerintah Kota Jambi meluncurkan rencana ini untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi yang ada antara masyarakat yang tinggal di pusat kota dan mereka yang tinggal di kabupaten atau pinggiran kota, selain untuk memenuhi tujuan resmi. Pembangunan gedung di pusat kota dan kawasan perbatasan menurut Pemerintah Kota Jambi tidak merata. Selain itu, terdapat perbedaan nyata antara kemampuan ekonomi masyarakat yang tinggal di pusat kota dengan masyarakat yang tinggal di kabupaten atau kota perbatasan. Perbedaan-perbedaan penting inilah yang mendorong terciptanya inisiatif Kampung Bantar yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan Kota Jambi. Untuk memitigasi ketimpangan pembangunan di Jambi, tujuan kami adalah meningkatkan kesejahteraan dan menstimulasi perekonomian masyarakat, dengan fokus di wilayah RT Kampung BANTAR.

Diharapkan wilayah Kota Jambi bebas narkoba dan minuman beralkohol, bebas dari tindak pidana, prostitusi, maksiat, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian rumah tangga, eksploitasi anak, serta adanya komitmen yang kuat untuk mencapai mufakat dalam rangka melaksanakan kegiatan SDI komunitas. Terdapat peluang untuk membentuk lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat, lembaga pendidikan, dan

kelompok yang fokus pada peningkatan sumber daya manusia, kesejahteraan sosial, pengembangan masyarakat, pelibatan pemuda, organisasi keagamaan, dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pada domain pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, , keamanan, dan ketertiban. Tujuan dari program-program tersebut adalah untuk memaksimalkan potensi sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Maksud dan tujuan Pemerintah Kota Jambi sudah sangat jelas. Kota Jambi ingin menjadi pusat perdagangan dan jasa, mengedepankan pengembangan masyarakat yang sadar moral dan budaya serta mengedepankan pelayanan prima kepada konsumen. Tujuan Kota Jambi adalah memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan efektivitas birokrasi. Kota ini juga ingin meningkatkan keselamatan publik, penegakan hukum, dan kesejahteraan umum. Selain mengelola infrastruktur perkotaan, utilitas, dan perencanaan lingkungan, kota ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan infrastruktur masyarakat. Terakhir, Pemkot ingin meningkatkan potensi perekonomian kawasan perkotaan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Walikota Kota Jambi menggunakan teknik inventif. Ia mengusung konsep Kampung Bantar, sebuah dusun yang cerdas, aman, dan higienis. Dewan Kota Jambi mencanangkan Program Kampung Bantar (Pintar, Aman, dan Bersih) sebagai upaya mempercepat pertumbuhan.⁴ Pembangunan adalah proses yang berkesinambungan dalam mengembangkan

⁴ Dokumentasi Pemerintah Kota Jambi, 2018

perbaikan dan pengembangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama Program Kampung Bantar adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang diukur melalui upaya ekonomi dan non-ekonomi, seperti perbaikan di bidang sosial, hukum, dan budaya. Dari sudut pandang ekonomi, pertumbuhan ekonomi jangka panjang atau proses peningkatan pendapatan per kapita yang berkelanjutan disebut sebagai pembangunan ekonomi. Hal ini tidak hanya mendorong peningkatan pendapatan per kapita tetapi juga mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Untuk meningkatkan produksi secara keseluruhan, setiap sumber daya yang dapat dimanfaatkan potensi dan pengembangannya harus didistribusikan secara efektif dan efisien.

Melalui implementasi inisiatif Kampung Bantar, Pemerintah Kota Jambi berupaya menyelesaikan permasalahan ketidakmerataan pembangunan di Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi memandang rencana ini sebagai pendorong utama tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka memberikan rekomendasi teknis penyelenggaraan Kampung Bantar ((Pintar, Aman, dan Bersih), telah diterbitkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2019. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong pemerataan pembangunan, khususnya di tingkat kecamatan, dan meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat melalui upaya gotong royong. Bekerja sama.

Pemerintah Kota Jambi meluncurkan Program Kampung Bantar (Pintar, Aman, dan Bersih) sebagai proyek untuk meningkatkan kesehatan penduduk perkotaan dan mempercepat pembangunan. Peraturan Walikota Jambi, khususnya Nomor 47 Tahun

2014 dan Nomor 11 Tahun 2019, yang mengatur parameter teknis pelaksanaan dan penilaian program, mengatur tentang program tersebut.

Indikator utama Program Kampung Bantar meliputi:

1. Kebersihan (Bersih): Masyarakat didorong untuk menjaga lingkungan yang bersih dengan partisipasi aktif dalam kegiatan seperti gotong royong membersihkan lingkungan, pengelolaan sampah, dan penghijauan.
2. Keamanan (Aman): Program ini juga fokus pada peningkatan keamanan lingkungan melalui pembentukan pos kamling, penerangan jalan yang memadai, serta pelatihan bagi warga dalam menghadapi situasi darurat.
3. Kepintaran (Pintar): Masyarakat didorong untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan dengan menyediakan akses ke pendidikan informal, pelatihan keterampilan, dan kegiatan budaya serta olahraga.

Program Kampung Bantar merupakan wujud kewajiban pemerintah untuk memajukan kesejahteraan rakyat, karena tujuan dibentuknya pemerintahan adalah untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, dua hal yang harus diprioritaskan oleh pemerintah yang bertanggung jawab adalah sebagai berikut:

- a) Keterhubungan yang sebaik-baiknya antara prioritas pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan

- b) Pemerintahan yang aktif berupaya mencapai tujuan nasional Indonesia dan berjalan secara efektif dan efisien sangat diharapkan.⁵

Program Kampung Bantar juga mengadvokasi terciptanya kepastian hukum. Menegakkan hukum yang adil adalah salah satu tanggung jawab pemerintah yang paling sulit, namun juga penting bagi penyelenggaraan dan kemajuan negara. Untuk membangun kredibilitas pemerintah dan menunjukkan profesionalisme, kejelasan hukum sangatlah penting. Hal ini penting untuk mendorong pembangunan dan menjalankan pemerintahan secara efisien. Berbagai kebijakan publik perlu dirumuskan secara tepat guna menjaga kepastian hukum. Pada akhirnya, agar konsep atau rekomendasi tersebut sah secara hukum, konsep atau rekomendasi tersebut harus dimasukkan dalam sistem legislatif dan memiliki kerangka hukum yang tepat dan tidak ambigu.⁶

Melalui inisiatif Kampung Bantar, pemerintah secara sistematis dan berhasil memajukan pembangunan masyarakat. Melalui pemanfaatan kelompok masyarakat, Pemerintah dengan kekayaan ilmu pengetahuannya berhasil membina masyarakat.

Kota Jambi diberikan otonomi daerah melalui Program Kampung Bantar yang memungkinkannya berkembang sesuai potensi dan kemampuannya. Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2019 yang memuat standar teknis penciptaan dan penilaian Kelurahan bersih, aman, dan cerdas di Kota Jambi mengatur program ini.

⁵ Edy Topo Ashari dan Desi Fernanda, *Membangun Kepemerintahan yang Baik*, (Jakarta: LAN-RI, 2001), hlm. 62.

⁶ Edy Topo Ashari dan Desi Fernanda, *Membangun Kepemerintahan yang Baik*, hlm. 72-73

Pemerintah Kota Jambi berkomitmen menjalankan Program Kampung Bantar guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Baik masyarakat maupun pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjaga taraf hidup di daerahnya. Pemerintah mampu membuat Program Kampung Bantar yang tepat dan dapat dilaksanakan setiap tahun berdasarkan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan inisiatif pemerintah, program Kampung Bantar telah berjalan efektif selama lima tahun di berbagai wilayah Kota Jambi dengan tujuan untuk meningkatkan kebersihan, keamanan, dan kecerdasan. Program ini dimulai oleh Pemerintah Kota Jambi sebagai respon atas maraknya permasalahan sanitasi yang tidak memadai dan ketidakpedulian masyarakat tertentu terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, terdapat penurunan nyata dalam kesediaan untuk bekerja sama dan rasa kekompakan sosial.

Selama wilayah masing-masing RT memenuhi standar yang ditetapkan oleh panel penilaian Kampung Bantar, maka RT yang telah berpartisipasi aktif dalam inisiatif Kampung Bantar diakui dan diberi penghargaan oleh program tersebut. Setiap tahunnya program ini dilombakan, dimulai dari lomba tingkat kecamatan, berlanjut ke turnamen tingkat kecamatan, hingga akhirnya melibatkan seluruh Kota Jambi. Tujuan dari kompetisi ini adalah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam inisiatif Kampung Bantar.

Kelurahan Telanaipura merupakan salah satu kelurahan di Kota Jambi yang berpartisipasi dalam Program Kampung Bantar. Program Kampung Bantar belum berjalan secara optimal karena masih ditemukannya kekurangan tong sampah kebersihan di setiap rumah, tidak adanya penjaga lingkungan atau ronda malam yang

di lakukan warga secara bergantian untuk mengawasi keamanan lingkungan dari kriminalitas pencurian, dan jarang dilakukannya kerja sama atau bakti sosial (Gotong Royong) sehingga program kampung bantar yang ada di Kelurahan Telanaipura tidak seusai dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 14 tahun 2017 yang mana telah di atur tata cara secara teknis dan belum memenuhi sesuai harapan masyarakat kelurahan Telanaipura Kota Jambi.

Saat ini, masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian dalam menjaga lingkungan yang sehat. Hanya tahap penilaian inisiatif Kampung Bantar (Pintar, Aman, dan Bersih) yang terbuka untuk diikuti sertakan. Namun demikian, kategori BANTAR (Pintar, Aman, dan Bersih) tidak sejalan dengan kondisi dan keadaan setempat. Pada tahun 2016, 2017, dan 2018, RT 04 Kelurahan Telanaipura mengikuti lomba Kampung Bantar (bersih, aman, dan cerdas). Meski RT 04 selalu ikut serta, namun dalam tiga tahun penyelenggaraannya tidak pernah menang. Pantauan langsung di lapangan menunjukkan, RT 04 yang masuk kategori BANTAR (Pintar, Aman, dan Bersih) masih belum tertata rapi.

Untuk pemernang lomba kampung Bantar pada tahun 2018 tidak ada satupun pemenang dari Kelurahan Telanaipura. Untuk mengetahui pemenang lomba kampung bantar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1
Daftar Pemenang Lomba Kampung Bantar

No	RT	Kelurahan	Kecamatan	No	RT	Kelurahan	Kecamatan
1	49	Kenali Asam	Kota Baru	32	9	Solok Sipin	Danau Sipin
2	18	Kenali Asam Atas	Kota Baru	33	8	Pakuan Baru	Jambi Selatan
3	22	Kenali Asam Atas	Kota Baru	34	32	Kenali Asam Bawah	Kota Baru
4	6	Simpang III Sipin	Kota Baru	35	39	Simpang III Sipin	Kota Baru
5	21	Pasir Putih	Jambi Selatan	36	37	Payo Selincah	Paal Merah
6	9	Kenali Asam Atas	Kota Baru	37	7	Sungai Asam	Pasar Jambi
7	19	Kenali Asam Atas	Kota Baru	38	5	Sungai Asam	Pasar Jambi
8	56	Eka Jaya	Paal Merah	39	15	Kebun Handil	Jelutung
9	55	Eka Jaya	Paal Merah	40	21	Cempaka Putih	Jelutung
10	3	Talang Bakung	Paal Merah	41	15	Talang Banjar	Jambi Timur
11	50	Lingkar Selatan	Paal Merah	42	31	Penyengat Rendah	Telanaipura
12	28	Paal Merah	Paal Merah	43	4	Tanjung Pasir	Danau Teluk
13	42	Eka Jaya	Paal Merah	44	1	Buluran Kenali	Telanaipura
14	1	Paal Merah	Paal Merah	45	3	Jelmu	Pelayangan
15	12	Handil Jaya	Jelutung	46	1	Tanjung Raden	Danau Teluk
16	5	Tanjung Pinang	Jambi Timur	47	4	Buluran Kenali	Telanaipura
17	21	Tanjung Sari	Jambi Timur	48	2	Tanjung Raden	Danau Teluk
18	8	Sijenjang	Jambi Timur	49	12	Sukakarya	Kota Baru
19	3	Kasang	Jambi Timur	50	38	Thehok	Jambi Selatan

No	RT	Kelurahan	Kecamatan	No	RT	Kelurahan	Kecamatan
20	19	Pematang Sulur	Telanaipura	51	27	Kenali Asam Atas	Kota Baru
21	18	Buluran Kenali	Telanaipura	52	13	Murni	Danau Sipin
22	1	Olak Kemang	Danau Teluk	53	14	Murni	Danau Sipin
23	10	Penyengat Rendah	Telanaipura	54	4	Beringin	Pasar Jambi
24	3	Bagan Pete	Alam Barajo	55	44	Eka Jaya	Paal Merah
25	34	Mayang Mangurai	Alam Barajo	56	3	Sungai Asam	Pasar Jambi
26	57	Kenali Besar	Alam Barajo	57	39	Jelutung	Jelutung
27	3	Kenali Besar	Alam Barajo	58	18	Cempaka Putih	Jelutung
28	10	Solok Sipin	Danau Sipin	59	12	Lebak Bandung	Jelutung
29	32	Rawasari	Alam Barajo	60	21	Payo Lebar	Jelutung
30	33	Kenali Besar	Alam Barajo	61	14	Pematang Sulur	Telanaipura
31	18	Murni	Danau Sipin	62	3	Mudung Laut	Pelayangan

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat., 2024

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa Kecamatan Kota Baru, Danau Sipin, dan Paal Merah memiliki banyak RT yang memenangkan lomba, menunjukkan bahwa wilayah-wilayah ini memiliki potensi yang tinggi dalam penerapan program Kampung Bantar. Adapun beberapa kelurahan seperti Kenali Asam Bawah, Kenali Asam Atas, dan Eka Jaya tampak sangat aktif dan berhasil dalam lomba ini.

Putri pernah melakukan kajian dengan judul "Evaluasi Kebijakan Walikota dalam Mewujudkan Kelurahan Bersih, Aman, dan Cerdas (BANTAR) di Kabupaten Kota Baru Jambi." Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Kabupaten Kota Baru

dalam memperkenalkan Kampung Bantar belum berhasil. Buktinya, belum semua Tim Daerah (RT) di Kecamatan Kota Baru mengikuti program Kampung BANTAR.⁷ Penelitian “Evaluasi Kebijakan Kampung Bantar di Kecamatan Paal Merah” dilakukan oleh Prabawa. Kesimpulan diskusi menunjukkan bahwa penerapan kebijakan program Kampung Bantar di Kecamatan Paal Merah belum mencapai potensi efisiensi secara maksimal. Fakta bahwa masih ada RT yang belum berpartisipasi dalam kampanye ini menjadi buktinya.⁸

Berdasarkan perbandingan dengan beberapa penelitian mengenai Evaluasi Program kampung Bantar dalam berbagai bentuk penulisan melihat proses pelaksanaannya, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penulis lebih menekankan tentang Evaluasi Program Kampung Bantar di Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi yang bertujuan agar kampung menjadi bersih aman dan pintar dapat dilakukan dengan mudah, efisien, dilakukan secara bersama musyawarah dan mufakat.

Berdasarkan observasi awal di lapangan bahwa pelaksanaan Kampung Bantar yang berada di Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi khususnya RT 04 belum berjalan secara optimal karna masih banyak terdapat hambatan-hambatan baik dari segi sarana maupun prasarana. Berdasarkan pemaparan masalah di atas maka

⁷ Putri, Aulia Cindy Dwi. Evaluasi Kebijakan Walikota dalam Mewujudkan Kampung Bersih Aman dan Pintar (BANTAR) di Kecamatan Kota Baru Jambi. (2019) eprints.ipdn.ac.id (dikunjungi tanggal 16 Desember 2020 : 04.52 Wib

⁸ Prabawa, Hersens Nursa. Evaluasi Kebijakan Kampung Bantar di Kecamatan Paal Merah. Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 2, No. 1, Februari 2020: 33 – 44

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Program Kampung Bantar Di Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang informasi yang diberikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi pelaksanaan Program Kampung Bantar di Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi ?
2. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan Program Kampung Bantar di Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masakah, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan program Kampung Bantar di Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan Program Kampung Bantar di Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan perspektif signifikan dan ide-ide baru bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu pemerintahan dan sosial.

b. Manfaat Praktis

Tujuan dari studi ini adalah untuk memberikan perspektif dan data yang signifikan kepada pemerintah untuk pembuatan kebijakan teknis yang dituangkan dalam Perwal Nomor 14 Tahun 2017. Tujuannya adalah untuk memastikan Kampung Bantar dapat mengikuti peraturan dan meningkatkan infrastruktur dan fasilitasnya dengan tepat.

1.5. Landasan Teori

1.5.1 Kebijakan Publik

Kebijakan biasanya digunakan untuk menentukan dan menguraikan keputusan-keputusan paling penting untuk memperbaiki kehidupan, baik dalam konteks kebijakan publik atau perusahaan swasta.⁹ Kebijakan publik mengacu pada keputusan yang dibuat oleh pemerintah sebagai respons terhadap isu politik atau krisis publik. Pilihan ini didukung oleh norma dan nilai. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menyeimbangkan perbedaan yang ada antara norma dan cita-cita dengan keadaan sebenarnya. Dalam pengertian ini, “kebijakan publik” secara khusus mengacu pada

⁹ Sahya Anggara, Kebijakan Publik, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 14.

pilihan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah, serta tujuan menyeluruh yang mengarahkan pilihan dan tindakan tersebut. Kebijakan menawarkan arahan untuk memilih tindakan dan keputusan yang paling mungkin memberikan hasil yang diinginkan.¹⁰ Pendapat umum menyatakan bahwa kebijakan publik, atau pilihan yang diambil pemerintah dalam mengatasi permasalahan politik atau isu publik, itulah yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah.

Tujuan kebijakan publik adalah sebagai berikut: a) alokasi dan redistribusi sumber daya; b) pengaturan dan pemajuan kebebasan; c) stabilitas dan promosi perubahan; dan d) penguatan kewenangan negara dan efektivitas pasar. Proses pembuatan kebijakan atau pengaruhnya dilakukan secara aktif oleh para pembuat kebijakan.

Seseorang yang memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan dan prosedur di tingkat mana pun—internasional, nasional, regional, atau lokal—dikenal sebagai pembuat kebijakan. Berbagai aktor membedakan pembentukan kebijakan publik. Individu seperti politisi, pegawai negeri, pelobi, konsultan, auditor, dan lain-lain adalah contoh pelaku. Mereka memiliki kapasitas untuk menyusun, merumuskan, menilai, dan menyetujui kebijakan.

Proses lima langkah pembuatan kebijakan William N. Dunn didukung oleh berbagai elemen. Fase-fase ini meliputi penetapan agenda, pengembangan kebijakan, adopsi, evaluasi, dan penilaian. Masalahnya dikenali dan didefinisikan sebelum

¹⁰ Thei Geurts, *Public Policy Making: The 21st Century Perspective*, (Netherlands: Be Informed, 2011), hlm. 6.

mengembangkan agenda kebijakan. Perkiraan opini kemudian digunakan dalam proses pengembangan kebijakan. Ide-ide yang muncul dijadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan. Proses evaluasi kebijakan diawasi dengan ketat. Terakhir, mekanisme penilaian dan evaluasi kebijakan diterapkan.

Instansi Pemerintah Daerah adalah organisasi pemerintahan mandiri yang berkedudukan di daerah tertentu. Mereka diberi kewenangan mandiri dan diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahan daerah. Walikota dan Perangkat Daerah merupakan dua anggota utama Pemerintah Daerah; mereka berfungsi sebagai divisi administratif badan.¹¹

Kebijakan merupakan kumpulan tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan tertentu dalam proses penyelesaian permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kebijakan-kebijakan ini biasanya diberlakukan melalui undang-undang, inisiatif, dan program yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk sektor publik dan komersial. Beberapa komponen utama kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah: Tahap pertama dalam kebijakan publik adalah mengidentifikasi masalah yang perlu diatasi. Ini melibatkan penelitian dan analisis untuk memahami isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat dan menentukan prioritas yang perlu ditangani.

¹¹ Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (2).

2. **Formulasi Kebijakan:** Setelah masalah diidentifikasi, langkah berikutnya adalah merumuskan kebijakan yang dapat mengatasi masalah tersebut. Ini melibatkan pengembangan berbagai opsi kebijakan dan evaluasi potensi dampaknya.
3. **Pengambilan Keputusan:** Dalam tahap ini, pemerintah memutuskan opsi kebijakan mana yang akan diadopsi. Proses ini melibatkan diskusi dan negosiasi di antara para pembuat kebijakan, serta konsultasi dengan para pemangku kepentingan.
4. **Implementasi Kebijakan:** Eksekusi kebijakan dilakukan setelah keputusan diambil. Untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan tercapai, hal ini melibatkan pengalokasian sumber daya, pelaksanaan program, dan pengawasan penerapan kebijakan.
5. **Evaluasi Kebijakan:** Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan setelah diimplementasikan. Ini melibatkan pengumpulan data dan analisis untuk melihat apakah kebijakan tersebut berhasil mengatasi masalah yang diidentifikasi pada awalnya dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Sebagai contoh, Program Kampung Bantar di Kota Jambi merupakan sebuah kebijakan publik yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan lingkungan, keamanan, dan pendidikan. Kebijakan ini mencakup berbagai langkah, mulai dari penyusunan peraturan teknis, pelibatan masyarakat dalam kegiatan gotong royong, hingga evaluasi dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan publik yang baik biasanya memiliki beberapa karakteristik, seperti jelasnya tujuan yang ingin dicapai, partisipasi aktif dari masyarakat, dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, serta adanya mekanisme evaluasi untuk menilai keberhasilan kebijakan tersebut.

1.5.2. Konsep Evaluasi Kebijakan

Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris; dalam bahasa Indonesia disebut evaluasi, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *evaluation*. Penilaian adalah yang dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dengan penilaian.¹² Oleh karena itu, penilaian dapat diartikan sebagai tindakan melakukan penilaian, dan penilaian itu sendiri dapat dicirikan sebagai proses evaluasi. Para ahli yang berbeda-beda memandang evaluasi dengan cara yang berbeda-beda.

Evaluasi adalah proses metodis yang menentukan kondisi yang tepat di mana tujuan tertentu dapat dicapai. Selalu ada proses yang terlibat dalam evaluasi. Bahasa perilaku sering kali mewakili tujuan spesifik yang harus diselaraskan dengan proses evaluasi, karena perilaku yang berbeda memerlukan metode evaluasi yang berbeda. Akibatnya, evaluasi menjadi lebih sulit dan rumit.¹³ Ada yang berpendapat bahwa evaluasi adalah tugas yang sulit.

¹² <http://kbbi.web.id/evaluasi>, diakses pada tanggal 20 Mei 2024, pukul 14.44 WIB.

¹³ M. Sukardi, *Evaluasi Pendidikan : Prinsip dan Operasionalnya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm.1

Penilaian berkaitan dengan tindakan pengukuran dan pemeringkatan. Dari sudut pandang global, evaluasi mencakup aktivitas menilai atau menilai sesuatu, sedangkan pengukuran adalah tindakan mengukur sesuatu.¹⁴

Evaluasi menurut Wirawan adalah proses pengumpulan data mengenai suatu subjek penelitian secara metodis dan mengevaluasinya berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.¹⁵ Data yang berkaitan dengan objek penilaian dimasukkan ke dalam hasil, dan data ini kemudian digunakan untuk membuat penilaian terhadap objek yang bersangkutan. Topik tinjauan dapat mencakup kebijakan, inisiatif, program, staf, orang, objek, dan sebagainya. 5. Menurut Wirawan, evaluasi adalah suatu proses yang menghasilkan kumpulan data yang dapat digunakan sebagai pedoman pengambilan keputusan karena membandingkan sesuatu dengan standar evaluasi yang telah ditetapkan. Efektivitas.

Widoyoko mengutip perkataan Stufflebeam dan Shinkfield bahwa:

“Evaluation is the methodical process of obtaining and evaluating data in order to determine the importance and efficacy of an object's objectives, design, and overall impact. Its goals are to improve understanding of the phenomena under evaluation, guarantee accountability, and provide information for decision-making.

”¹⁶

Definisi penilaian yang diberikan di atas menunjukkan bahwa evaluasi adalah suatu prosedur metodis dengan tujuan mengumpulkan dan menyajikan berbagai data

¹⁴ *Ibid*, hlm 6

¹⁵ Wirawan, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm.3

¹⁶ *Ibid*

yang dapat digunakan sebagai pendukung diskusi selama proses pengambilan keputusan.

Pandangan berbeda mengenai evaluasi diungkapkan oleh Komite Pengkajian Nasional (Panitia Evaluasi), menurut Widoyoko, sebagai berikut:

“Evaluation is a methodical process that selects pertinent information with care, collects and analyzes data, and presents the results to decision makers in a clear and useful summary that helps them select the best option from a range of options.”¹⁷

Dari pengertian penilaian di atas maka evaluasi adalah suatu prosedur sistematis yang dimulai pada tahap seleksi dan diakhiri dengan penyajian informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan.

Beberapa definisi para ahli menunjukkan bahwa evaluasi lebih dari sekedar pengukuran atau penilaian; ini adalah proses yang terencana dan sistematis. Hal ini memerlukan perolehan, evaluasi, dan penyajian data secara metodis untuk mendukung pengambilan keputusan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, penilaian merupakan suatu proses yang kompleks dan berkesinambungan yang berupaya untuk menentukan manfaat suatu kegiatan guna sampai pada suatu keputusan akhir.

Evaluasi kebijakan digunakan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Menurut Muhadjir dalam Widodo mengemukakan “Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu

¹⁷ Eko Putro Widoyoko, *Evaluasi Program Pembelajaran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 3

kebijakan publik dapat “membuahkan hasil”, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan publik yang ditentukan”.¹⁸

Dalam bahasa yang lebih singkat Jones dalam Winarno mengartikan evaluasi adalah “Kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan”.³⁹ Serta secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai “Kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang menyangkut substansi, implementasi, dan dampak”.¹⁹ Hal ini berarti bahwa proses evaluasi tidak hanya dapat dilakukan pada tahapan akhir saja, melainkan keseluruhan dari proses kebijakan dapat dievaluasi.

Secara umum, evaluasi sebagai suatu prosedur atau kegiatan mencapai tiga tujuan utama:

- a. menilai kemajuan,
- b. membantu dalam pengembangan rencana,
- c. merekondisi atau meningkatkan sekali lagi.²⁰

Tindakan evaluasi pada hakikatnya dimaksudkan untuk mendukung perbaikan atau kemajuan. Banyak aktivitas yang menggabungkan evaluasi berkelanjutan untuk memudahkan pelacakan dan evaluasi pencapaian tujuan. Asesor mempunyai kesempatan untuk menentukan apakah tujuan akan tercapai dalam jangka waktu yang ditentukan melalui evaluasi yang berkelanjutan. Penilai akan secara metodis

¹⁸ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, (Jakarta. Bayumedia, 2008), hal.13

¹⁹ Budi Winarno. *Kebijakan Publik*, (Jakarta : Pt. Buku Kita, 2008), hal. 102

²⁰ *Ibid*

menemukan dan memeriksa penyebab dan solusi alternatif jika data evaluasi menunjukkan bahwa tujuan tidak akan tercapai sebagaimana dimaksud.²¹

Sebagai salah satu tahapan dalam proses kebijakan, evaluasi memiliki fungsi dan tujuan. Menurut Wibawa dalam Nugroho, evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

a. Eksplanasi.

Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

b. Kepatuhan.

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.

c. Audit.

Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.

d. Akunting.

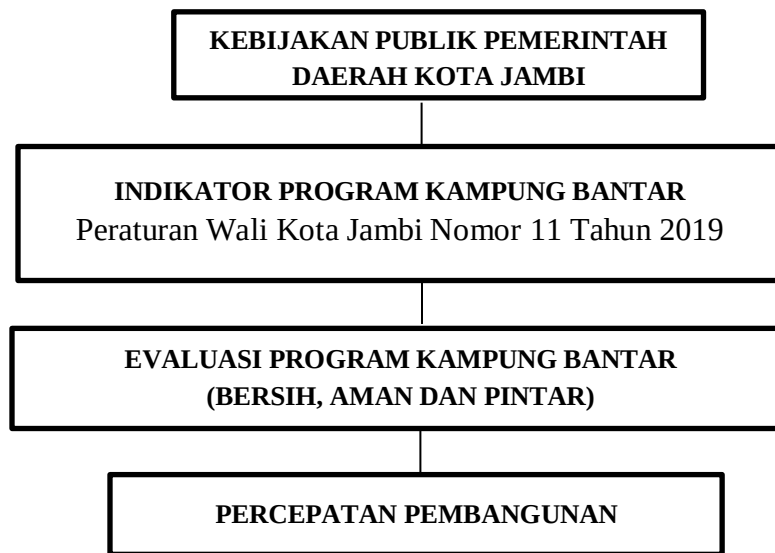
Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosialekonomi dari kebijakan tersebut.²²

²¹ *Ibid*

²² Riant Nugroho, *Public Policy*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2009), 83.

1.6. Kerangka Berfikir

Sesuai dengan latar belakang dan teori yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berfikir

1.7. Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Fokus skripsi penulis adalah penelitian kualitatif. Menurut Creswell, pendekatan kualitatif menyelidiki dan memahami makna yang diberikan oleh orang atau kelompok berbeda terhadap masalah sosial atau kemanusiaan. Pendekatan penelitian kualitatif ini terdiri dari beberapa tugas mendasar, seperti merumuskan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data akurat dari partisipan, melakukan

analisis induktif terhadap data yang bergerak dari tema sempit ke tema lebih luas, dan menafsirkan makna data.²³.

Perlunya observasi langsung terhadap suatu fenomena di lapangan dan kemampuan penelitian kualitatif dalam mengumpulkan data baik tertulis maupun lisan dari pihak-pihak terkait menjadi alasan penulis memilih teknik kualitatif.

1.7.2 Lokasi / Objek Penelitian

Lokasi penelitian diadakan di Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.

1.7.3 Fokus dan Dimensi Penelitian

Spradley menyoroti bahwa fokus penelitian kualitatif adalah menganalisis satu atau lebih domain yang terkait dengan situasi sosial, seperti dikutip Sugiyono. Derajat orisinalitas data yang diperoleh dari lingkungan sosial (lapangan) menentukan fokusnya. Peneliti melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memilih fokus penelitian. Peneliti akan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi sosial yang masih dalam tahap awal melalui kajian eksploratif ini.²⁴

Fokus dari penelitian ini adalah peneliti berfokus pada sejauh mana evaluasi program Kampung Bantar di Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.

²³ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), Hlm. 4-5.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Hlm. 209.

1.7.4 Sumber Data

Sumber data memberikan informasi yang digunakan dalam upaya penelitian. Oleh karena itu, untuk melakukan penelitian ini, data terkait harus diperoleh dari organisasi yang terlibat dalam pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini secara umum akan dibagi menjadi dua kelompok:

1. Data primer

Sumber data primer adalah sumber yang memberikan informasi kepada orang atau organisasi yang mengumpulkan data secara langsung. Data primer dikumpulkan peneliti dari informan dan responden yang mempunyai pengetahuan mendalam terhadap topik tertentu yang diteliti. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi.

2. Data sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang tidak dikumpulkan secara langsung oleh pengumpul data, namun diperoleh secara tidak langsung melalui sumber seperti individu atau dokumen. Bukti penelitian ini konsisten dengan data asli, yang dapat ditemukan di berbagai sumber, termasuk catatan aktivitas, laporan, dokumen, dan foto.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Pencarian informan merupakan suatu teknik yang digunakan oleh peneliti kualitatif untuk menentukan orang-orang mana yang akan menjadi sumber informasi utama (informan). Dalam penelitian kualitatif, informan dipilih berdasarkan keterlibatan langsung mereka dengan topik penelitian; teknik

pengambilan sampel tidak digunakan.²⁵. Ini adalah metode data kunci untuk mengidentifikasi informan. Melalui peninjauan langsung ke lokasi penelitian dan wawancara informan, peneliti mengumpulkan data primer.

Pengambilan sampel purposif lebih tepatnya, teknik pengambilan sampel sumber data adalah strategi pengambilan sampel yang digunakan. Landasan strategi ini adalah pemilihan sampel dengan data yang kaya atau lengkap.

Mereka yang ikut serta dalam penelitian sebagai informan antara lain:

1. Lurah Kelurahan Telanaipura
2. Staf Kantor Kelurahan Telanaipura
3. Sekretaris RT. 04 Kelurahan Telanaipura
4. Penduduk RT. 04 Kelurahan Telanaipura

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Para peneliti menggunakan banyak teknik untuk mengumpulkan data primer, yang meliputi:

1. Wawancara (*interview*)

Pertukaran ide dan informasi secara kolaboratif antara dua orang disebut wawancara. Hal ini dibantu dengan serangkaian tanya jawab dengan tujuan menciptakan makna seputar topik tertentu. Wawancara penelitian, menurut pendapat Susan Stainback, menawarkan wawasan yang lebih mendalam tentang

²⁵ Pahrudin, Makmun Wahid,dkk., *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, hlm. 24.

persepsi partisipan terhadap peristiwa dan fenomena dibandingkan dengan observasi sederhana.²⁶

Wawancara semi-terstruktur digunakan oleh peneliti selama studi mereka. Wawancara jenis ini termasuk dalam genre wawancara mendalam, yang dibedakan dengan wawancara terstruktur karena pendekatannya yang lebih fleksibel. Pendekatan wawancara khusus ini mendorong orang yang diwawancarai untuk mengungkapkan pendapat dan wawasan mereka guna mendorong penyelidikan tantangan yang lebih jujur. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu memperhatikan dengan seksama apa yang dikatakan informan dan mencatatnya.²⁷

2. Observasi

Menurut Cresswell, observasi adalah proses dimana para ilmuwan mengamati dengan cermat segala sesuatu di lapangan dengan menggunakan panca indera penglihatan, peraba, pendengaran, penciuman, dan perasa seringkali dengan bantuan alat atau teknologi, dan kemudian mencatat temuannya untuk penelitian di masa depan. Pertanyaan dan tujuan penelitian adalah sumber observasi tersebut. Marshall, sebaliknya, mengklaim bahwa peneliti belajar tentang perilaku dan pentingnya perilaku melalui observasi yang cermat.²⁸

²⁶ *Ibid.*, hlm.231-232

²⁷ *Ibid.*, hlm. 233

²⁸ Sugiyono, *Op.Cit*, hlm. 226.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif terorganisir yang mencakup sejumlah besar data faktual dan data yang disimpan dalam bentuk fisik. Otobiografi, surat pribadi, buku atau buku harian, kenangan, kliping surat kabar, catatan pemerintah atau swasta, data server, dan data flash disk yang disimpan di situs web hanyalah beberapa contoh dari berbagai jenis bahan dokumenter. Foto, catatan kehadiran, laporan kegiatan, dan dokumen lainnya termasuk bahan yang dikutip dalam dokumentasi penelitian.²⁹

1.7.7 Teknik Analisis Data

Seperti yang diungkapkan Miles dan Huberman dalam Sugiyono, peneliti menggunakan analisis induktif untuk melakukan analisis. Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyusunan kesimpulan merupakan langkah-langkah dalam proses ini.

1.8 Pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data, terlebih dahulu dilakukan observasi di lokasi penelitian yaitu Kelurahan Telanaipura di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi. Setelah itu dilanjutkan dengan wawancara kepada informan penelitian. Para peneliti juga mendukung temuan mereka dengan dokumentasi.

1.9 Reduksi data. Praktik memilih data tertentu dan berfokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan modifikasi data mentah dari wawancara

²⁹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014), Hlm. 33.

dikenal sebagai reduksi data. Para ahli memeriksa data yang dikumpulkan untuk mendapatkan rincian terkait tentang inisiatif aksesibilitas dan layanan yang ditawarkan.

1.10 Presentasi Data. Penggambaran data terstruktur yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan memilih langkah apa yang harus diambil selanjutnya dikenal sebagai penyajian data.

1.11 Menarik kesimpulan. Kesimpulannya adalah tahap terakhir dari sebuah proyek penelitian. Kesimpulan membantu dalam alur sebab dan akibat, konsistensi dalam pola penjelasan, serta penemuan dan pemahaman pentingnya. Temuan penelitian ini dengan jelas menjawab permasalahan yang ada dengan menawarkan solusi konklusif terhadap permasalahan yang diajukan.

1.7.8 Keabsahan Data (Triangulasi Data)

Penelitian kualitatif rentan terhadap kelemahan karena beberapa alasan. Pertama, faktor utama dalam penelitian kualitatif adalah subjektivitas peneliti. Kedua, terlalu bergantung pada instrumen penelitian seperti observasi dan wawancara dapat menimbulkan sejumlah kelemahan, terutama jika instrumen tersebut digunakan secara tidak terkendali atau transparan. Yang terakhir, keandalan temuan penelitian dapat sangat dipengaruhi oleh penggunaan sumber data kualitatif yang tidak dapat diandalkan. Untuk mengeksplorasi topik penelitian atau sosial, diperlukan mekanisme triangulasi yang mengintegrasikan berbagai sumber data, peneliti, teori, dan prosedur

metodologis. Karena setiap strategi mempunyai kelebihan dan kekurangan yang unik, triangulasi diperlukan. Oleh karena itu, triangulasi memungkinkan penggambaran realitas dengan lebih akurat.³⁰

³⁰ Pahrudin, Makmun Wahid,dkk.,*Op.Cit*, hlm.18

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1 Kondisi Geografis Kota Jambi

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Jambi sebagian besar merupakan wilayah datar dengan ketinggian berkisar antara 0 hingga 60 meter di atas permukaan laut. Meskipun daerah rawa terkonsentrasi di sekitar Sungai Batanghari yang merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera, yang membentang sepanjang 1.700 km daerah yang bergelombang terdapat di bagian utara dan selatan kota.

Batas-batas Kota Jambi adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi

Tabel 1.
Luas dan Jumlah Kelurahan di Kecamatan-Kecamatan di Kota Jambi

Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase	Jumlah Kelurahan	Jumlah RT
1. Kota Baru	36,11	17,56	5	176
2. Jambi Selatan	11,41	5,55	5	150
3. Jelutung	7,92	3,85	7	233
4. Pasar Jambi	4,02	1,96	4	58
5. Telanaipura	22,51	10,95	6	132
6. Danau Teluk	15,70	7,64	5	44
7. Pelayangan	15,29	7,44	6	46
8. Jambi Timur	15,94	7,75	9	192
9. Alam Barajo	41,67	20,27	5	204
10. Paal Merah	27,13	13,20	5	236
11. Danau Sipin	7,88	3,83	5	151
<i>Jumlah / Total</i>	205,38	100	62	1 624

Sumber : jambikota.bps.go.id

Berdasarkan informasi yang diperoleh, total luas lahan Kota Jambi adalah 205,38 hektare. Dengan luas 41,67 hektar, Kecamatan Alam Barajo merupakan kecamatan terluas di Kota Jambi. Sebaliknya, dengan luas wilayah 4,02 hektar, Kecamatan Pasar Jambi menjadi kecamatan terkecil. Dengan sembilan kecamatan, Kabupaten Jambi Timur mempunyai jumlah terbanyak. Senada dengan itu, Kecamatan Paal Merah dengan jumlah RT terbanyak adalah 236 RT.

2.2 Kondisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk adalah orang perseorangan yang telah menetap secara tetap di wilayah geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia selama paling singkat enam bulan. Hal ini juga berlaku bagi orang yang baru beberapa bulan berada di sini namun berencana untuk menginap.

Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Jambi Tahun 2005-2023

Tahun	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan (%)
2005	236.212	233.004	469.218	-
2004	238.723	237.511	476.234	1,5
2007	242.864	240.402	483.266	1,48
2008	247.951	243.219	491.170	1,64
2009	251.839	248.035	499.874	1,77
2010	257.312	251.963	509.275	1,88
2011	263.288	254.939	518.227	1,76
2012	267.607	255.965	523.572	1,03
2013	271.693	261.050	532.743	1,75
2014	273.654	264.937	538.591	1,1
2015	275.311	267.882	543.193	0,85
2016	279.704	272.010	551.714	1,57
2017	283.289	276.899	560.188	1,54
2018	285.492	282.570	568.042	1,41
2019	289.713	286.354	576.047	1,41
2020	293.217	290.270	583.487	1,29
2021	297.036	294.098	591.134	1,31
2022	302.346	296.410	598.756	1,29
2023	304.403	300.023	604.426	1,28
Rata-Rata				1,45

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2024

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Jambi terus meningkat antara tahun 2005 dan 2023. Tujuh belas tahun sebelumnya terjadi pertumbuhan penduduk sebesar 1,45 persen. Dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1,88 persen, jumlah penduduk mengalami peningkatan terbesar pada tahun 2010—dari 499.874 jiwa pada tahun sebelumnya menjadi 509.275 jiwa pada tahun 2010. Jumlah penduduk meningkat sebesar 0,85 persen pada tahun 2015, jumlah terkecil dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 543.193 jiwa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 538.591 orang pada tahun 2006.

Peningkatan jumlah penduduk di Kota Jambi disebabkan oleh peningkatan alami dan migrasi besar-besaran dari Kelurahan ke kota yang dipicu oleh tersedianya lapangan kerja. Kota Jambi, yang merupakan ibu kota provinsi, merupakan pusat kota dan karena ukurannya yang sangat besar, merupakan pusat penyerapan tenaga kerja yang penting.

2.3 Letak Geografis Kelurahan Telanaipura

Kelurahan Telanaipura terletak di Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia. Secara geografis, Kelurahan Telanaipura berada di wilayah tengah Kota Jambi dan merupakan salah satu kawasan yang strategis di kota tersebut.

Berikut adalah beberapa detail geografis mengenai Kelurahan Telanaipura:

1. Lokasi Sentral: Kelurahan ini berada di pusat administrasi Kota Jambi, dengan banyak kantor pemerintahan dan fasilitas umum penting yang terletak di

sekitarnya. Ini termasuk kantor Gubernur Jambi, Kantor DPRD, dan berbagai instansi pemerintah lainnya.

2. Batas Wilayah:

- Utara: Batas utara Telanaipura berdekatan dengan Sungai Batanghari, yang merupakan salah satu sungai terbesar di Jambi.
- Selatan: Di selatan, Telanaipura berbatasan dengan beberapa kelurahan lain yang juga berada di Kecamatan Telanaipura.
- Timur: Bagian timur dari Kelurahan Telanaipura berbatasan dengan Kelurahan Sungai Putri.
- Barat: Di barat, kelurahan ini berbatasan dengan Kelurahan Solok Sipin.

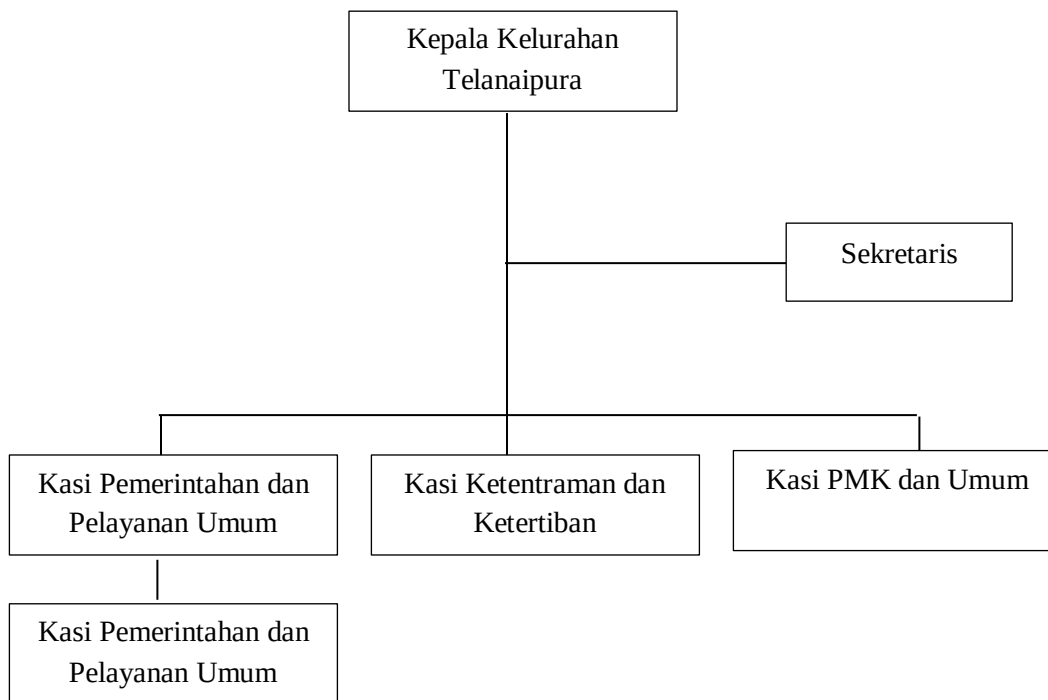
3. Topografi dan Iklim: Telanaipura memiliki topografi dataran rendah dengan beberapa area yang berada di dekat tepian sungai. Iklimnya tropis dengan curah hujan tinggi sepanjang tahun, yang umum di wilayah Sumatra.

4. Aksesibilitas: Karena lokasinya yang strategis di pusat kota, Telanaipura memiliki aksesibilitas yang baik dengan jaringan jalan utama yang menghubungkannya ke berbagai bagian Kota Jambi. Jalan-jalan utama di daerah ini juga mendukung transportasi publik dan mobilitas warga.

Secara keseluruhan, Kelurahan Telanaipura merupakan salah satu wilayah yang vital di Kota Jambi karena peran sentralnya dalam administrasi pemerintahan dan aksesibilitas yang baik ke berbagai fasilitas publik dan layanan pemerintahan.

2.4 Struktur Pemerintahan Kelurahan Telanaipura

Penanggung jawabnya adalah Lurah Telanaipura. Kemampuan, keuletan, dan pengetahuan para pemimpin pemerintahan kecamatan menentukan seberapa baik kinerjanya. Jabatan sekretaris camat masih terbuka karena belum ada petugas yang mendudukinya karena masih adanya masa peralihan jabatan. Selanjutnya mengenai pemerintahan Kecamatan Telanaipura diatur sebagai berikut:



Gambar 1.
Struktur Pemerintahan
Kelurahan Telanaipura

Struktur organisasi kelurahan merupakan suatu kerangka yang menyatukan penyelenggaraan program di lingkungan kelurahan sehingga memudahkan tercapainya tujuan program pembangunan yang ditetapkan oleh RT dan pemerintah kelurahan.

Kecamatan Telanaipura jelas terbebani dengan tugas yang diembannya. Rincian tugas tercantum sebagai berikut:

1. Kelurahan

Kecamatan pada dasarnya membidangi urusan sosial, pembangunan, dan administrasi pemerintahan. Hal ini dilakukan sejalan dengan gagasan otonomi daerah dan pembagian tugas dan tugas pendukung lainnya oleh walikota. Selain tugas pokoknya mengawasi, merumuskan, dan menangani permasalahan sosial, kecamatan juga menjalankan banyak peran, antara lain:

- a. Memungkinkan terkoordinasinya kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan;
- b. Merencanakan program pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
- c. mengelola pemeliharaan ketertiban umum dan operasi pemeliharaan perdamaian di tingkat kecamatan;
- d. Mempermudah hukum dan peraturan untuk diterapkan dan dipatuhi;
- e. Pengawasan terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik;
- f. Mendorong kepengurusan organisasi kecamatan;
- g. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugasnya.

2. Sekretaris Kelurahan

Tugas pokok jabatan ini adalah membantu Lurah dalam perencanaan, pengorganisasian perbekalan, pembuatan surat-surat, pengelolaan keuangan, pengawasan pegawai, dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Kelurahan. Tanggung jawab tersebut antara lain sebagai berikut dan dilaksanakan oleh Sekretaris Kecamatan:

- a. Menganalisis informasi atau data untuk memperoleh isi rencana kerja kecamatan;
- b. Menganalisis data dan informasi untuk membuat pedoman luas dan rencana teknis praktis untuk Sekretariat Kelurahan;
- c. Mendorong sinkronisasi sumber daya untuk penyusunan rencana kerja Kelurahan;
- d. Mengelola seluruh urusan keuangan, sumber daya manusia, dan administrasi;
- e. Melaksanakan perencanaan, penyusunan, dan pelaporan pencapaian keuangan dan operasional Kelurahan;
- f. Memenuhi kewajibannya untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat;
- g. Memantau, mengevaluasi, dan mencatat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kesekretariatan;
- h. Menyelesaikan tugas tambahan yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan peran dan kewajiban yang ditentukan

3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Membantu Lurah dalam melakukan analisa data dan informasi untuk menyusun rencana kerja dan kebijakan, serta mengevaluasi dan mendokumentasikan permasalahan pemerintahan, merupakan bagian dari fungsi tersebut. Selain melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menganalisis data dan informasi untuk membuat rencana kerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b. Menganalisis data dan informasi untuk membuat kebijakan luas dan permasalahan teknis operasional yang menjadi perhatian pemerintah kecamatan;
- c. Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan umum;
- d. pengelolaan administrasi kependudukan;
- e. mengawasi penyelenggaraan pertanian;
- f. Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan bagaimana penyelenggaraan pemerintahan;
- g. Menyelesaikan tugas tambahan yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya.

4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tugas pokoknya membantu Lurah dalam analisis data informasi untuk keperluan penyusunan rencana kerja dan kebijakan, serta melaksanakan, mengevaluasi, dan mendokumentasikan permasalahan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan lingkungan hidup. Tugas-tugas berikut harus diselesaikan oleh kepala bagian pemberdayaan masyarakat:

- a. Menganalisis informasi dan data untuk memperoleh muatan rencana kerja kecamatan di bidang pemberdayaan masyarakat;

- b. Menganalisis data dan informasi untuk membantu perumusan kebijakan komprehensif dan rencana teknis pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan masalah lingkungan hidup di tingkat kecamatan;
- c. Di bidang kesejahteraan masyarakat, saya bertugas menyusun dan mengkoordinasikan program-program yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan keluarga berencana, agama, dan pertumbuhan kesejahteraan keluarga serta organisasi kemasyarakatan lainnya. Selain itu, saya bertugas mengelola pelaksanaan inisiatif pengembangan masyarakat dan pencairan layanan sosial, dengan penekanan pada rumah tangga berpenghasilan rendah. Selain itu, saya bekerja untuk mendorong dan memfasilitasi proyek pembangunan ekonomi lokal.

5. Kepala Seksi Kesejahteraan sosial dan Pelayanan Umum Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan.

Mendukung Camat dalam menyusun bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dalam pelayanan publik merupakan tugas pokok Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Publik. Banyak tanggung jawab yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial berada dalam lingkup Bagian Pelayanan Publik Kesejahteraan Sosial:

- a. Menyusun rencana dan pedoman operasional Seksi Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Sosial;

- b. Mendukung pelaksanaan program taman kanak-kanak, pendidikan dasar, dan pendidikan anak usia dini;
- c. Mengelola dan mengawasi pemuda, olah raga, kebudayaan, kependuan, dan peran perempuan dalam program pendidikan;
- d. Memberikan pembinaan kepada lembaga adat dan keagamaan;
- e. Menerapkan arahan dan mengawasi operasional program kesehatan masyarakat;
- f. Memfasilitasi penyampaian layanan kesehatan dan pendidikan;
- g. Memastikan penyalahgunaan narkoba, opioid, zat adiktif, psikotropika, dan zat berbahaya dicegah dan diatur;
- h. Melakukan inisiatif penjangkauan untuk meningkatkan kesadaran akan program wajib belajar;
- i. Mengawasi pengelolaan organisasi kemasyarakatan seperti Majelis Taklim dan mengkoordinasikan pemberian bantuan sosial.
- j. Mengumpulkan informasi mengenai permasalahan sosial di Kelurahan.
- k. menerapkan strategi penanggulangan dan mitigasi bencana di Kelurahan.
- l. Mengevaluasi dan memberikan analisis menyeluruh terhadap cara Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Publik menjalankan tugasnya.
- m. Memenuhi tugas tambahan apa pun yang diberikan atasan Anda berdasarkan tugas dan tanggung jawab Anda.

6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Tugas pokok jabatan ini adalah membantu Lurah dalam analisis data informasi untuk pembuatan rencana kerja dan kebijakan, serta dalam pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Selain melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Kedamaian dan Ketertiban mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menganalisis data dan informasi untuk membuat rencana kerja ketertiban dan keamanan masyarakat di tingkat kecamatan;
- b. Melakukan analisa data dan informasi untuk menghasilkan kebijakan teknis yang menyeluruh dan praktis demi ketertiban dan ketentraman masyarakat di tingkat kecamatan;
- c. Pengelolaan kecamatan terhadap permasalahan ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- d. Menerapkan peraturan perundang-undangan dan menerapkannya;
- e. Penyusun program bertugas menyelenggarakan inisiatif-inisiatif yang berkaitan dengan pembangunan lingkungan, termasuk menegakkan hukum dan ketertiban, menjaga lingkungan, mendorong kebersihan, dan meningkatkan kondisi estetika dan higienis ruang publik. Mereka juga mendukung terciptanya inisiatif untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan daerah, seperti PERDA dan pedoman lain yang telah ditetapkan.

2.5 Profil RT.04 Kelurahan Telanaipura

RT 04 Merupakan salah satu RT yang berada di wilayah Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi. Wilayah RT 04 sangat mudah dijangkau oleh Roda 2 dan Roda 4 karna wilayah nya yang berada di pusat Kota Jambi. Dimana RT 04 memiliki jumlah penduduk laki laki sebanyak 210 jiwa dan Perempuan sebanyak 240 Jiwa dengan jumlah KK sebanyak 81 KK.

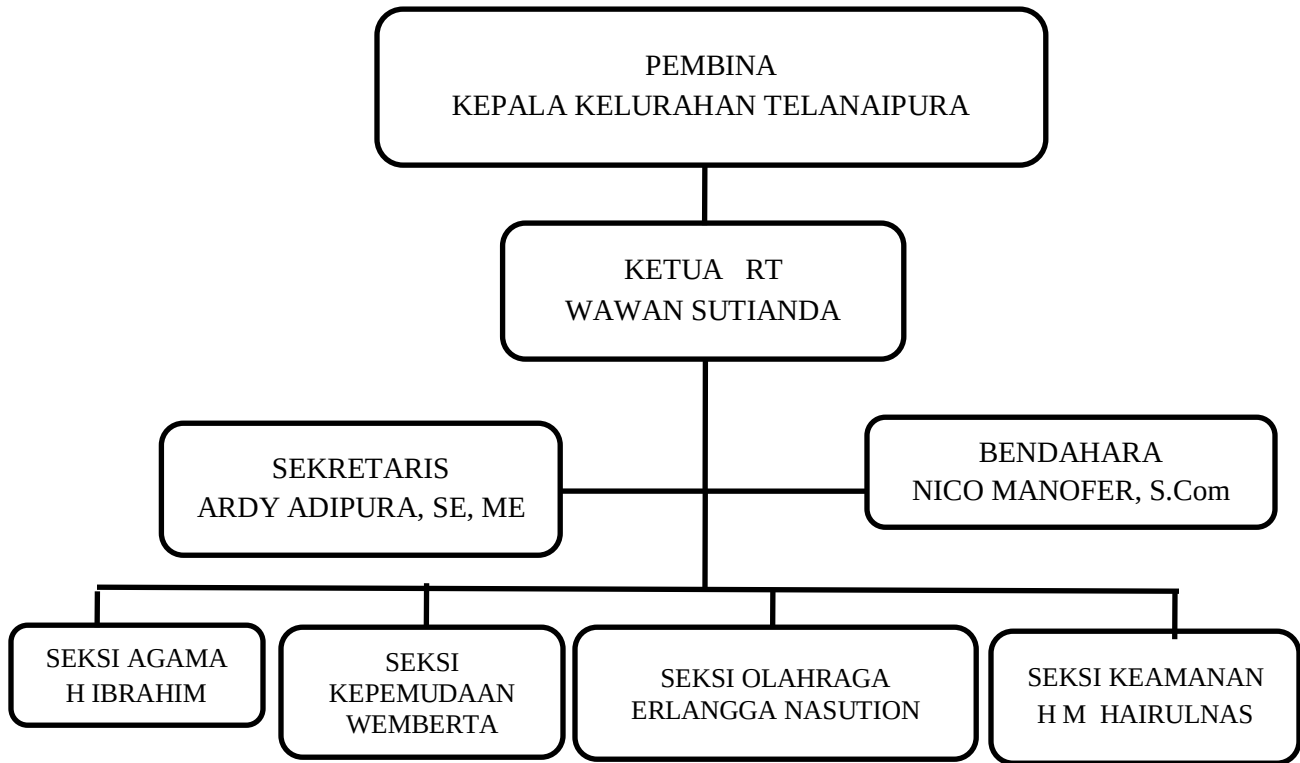
Data Penduduk berdasarkan jenis pekerjaan

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. Honorer / PNS | : 12 orang |
| 2. Dagang | : 15 Orang |
| 3. Swasta | : 81 Orang |
| 4. Buruh | : 10 Orang |
| 5. Lainnya | : 110 Orang |

Batas Wilayah RT.04 Kelurahan Telanaipura

- | | |
|-----------------|--|
| Sebelah Timur | : Berbatasan Universitas Jambi |
| Sebelah Barat | : Berbatasan Dengan Perintis Pancasila |
| Sebelah Selatan | : Berbatasan Dengan Asrama Tendra |
| Sebelah Utara | : Berbatasan Dengan Rumah Rektor UNJA |

Struktur Kepengurusan Rukun Tetangga RT 04



Gambar. 2

Struktur Organisasi RT.04 Kelurahan Telanaipura

BAB III

HASIL PENELITIAN

3.1 Evaluasi Program Kampung Bantar Di Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi

Pemerintah Kota Jambi meresmikan Kampung Bantar dengan tujuan untuk mempercepat pelaksanaan inisiatif pembangunan yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2019. Tujuan masyarakat dan pemerintah Kota Jambi bertujuan untuk mengurangi kesenjangan, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan khususnya di wilayah RT Kampung Bantar.

Program Kampung Bantar berupaya meningkatkan kualitas hidup di Kelurahan terkecil masyarakatnya dengan menjamin lingkungan yang bersih dan sehat, menyediakan prasarana lingkungan dan fasilitas sanitasi yang memadai, membangun permukiman yang tertib dan nyaman, mendorong keselamatan dan ketertiban, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. masyarakat, serta menumbuhkan rasa gotong royong yang kuat dan ketaatan pada nilai-nilai agama.

Program Kampung Bantar (bersih, aman, cerdas) dilaksanakan pada taraf hidup RT. 04 Penduduk Kecamatan Telanaipura dengan proses sebagai berikut:

3.1.1 Penyusunan Tujuan Program Kampung Bantar RT. 04

“Tujuannya untuk menjamin RT.04 tetap menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesadaran dan minat terhadap kesehatan dan kebersihan ekosistem setempat. Ubahlah menjadi ruang hunian yang memenuhi standar kebersihan, keamanan, penataan, dan tempat tinggal. Masyarakat perlu menunjukkan dedikasi yang kuat terhadap hukum, adat istiadat, persatuan bangsa, nilai-nilai agama, dan gotong royong, serta pembangunan sosial ekonomi

tingkat tinggi yang ditandai dengan produktivitas. Hal ini akan membantu negara maju secara moral, beradab, dan budaya”.³¹

Tujuan utama Program Kampung Bantar adalah menumbuhkan masyarakat yang mandiri, tangguh, aman, dan terinformasi melalui dorongan keterlibatan proaktif dan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah. Pada Hari Solidaritas Nasional (HKSAN) bulan Desember, skema Kampung Bantar (Pintar, Aman, dan Bersih) diperkenalkan sebagai proyek percontohan nasional. Tujuannya adalah untuk menjamin pertumbuhan Kota Jambi yang sejahtera dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inisiatif ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan kota. Tujuan Kampung Bantar menurut Camat Telanaipura Bapak Sukadi, S.E., adalah untuk mengurangi kesenjangan wilayah, meningkatkan kesejahteraan, dan meningkatkan kegiatan perekonomian..³²

Menurut Sekretaris RT. 04 bahwa:

"Kampung Bantar yang kami lakukan adalah melakukan gotong royong di hari minggu, mengadakan senam di rumah warga RT.04, membuat poskamling dan membuat pengolahan sampah. Kemudian mengadakan Posyandu, Posbindu, IVA test dan KB Gratis serta mengadakan pengajian RT ³³

Pemerintah Kota Jambi melaksanakan rencana yang disebut Kampung Bantar (Bersih, Aman dan Cerdas) dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan. Tujuan

³¹ Wawancara, Ardy, Sekretaris RT.04 Kelurahan Telanaipura, 20 Mei 2024

³² Wawancara, Sukadi, S.E, Lurah Kelurahan Telanaipura, 20 Mei 2024

³³ Wawancara, Ardy, Sekretaris RT.04 Kelurahan Telanaipura, 20 Mei 2024

pemerintah dan masyarakat Kota Jambi adalah untuk menutup kesenjangan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan, dan meningkatkan perekonomian daerah khususnya di lingkungan RT Kampung Bantar.

3.1.2 Dasar Hukum Program dan Pendamping Kampung Bantar RT. 04

Kota Jambi diberikan otonomi daerah melalui Program Kampung Bantar yang memungkinkannya berkembang sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Peraturan Walikota Jambi (PERWAL) Nomor 11 Tahun 2019 mengatur program ini dan memberikan standar teknis penciptaan dan penilaian Kelurahan cerdas, aman, dan bersih di Kota Jambi.

Kebijakan ini memberikan pedoman rinci dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Inisiatif Kampung Bantar. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan yang cerdas, aman, dan bersih dengan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Peraturan ini menekankan betapa pentingnya kolaborasi masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan program.

Pemerintah Kota Jambi berkomitmen menjalankan Program Kampung Bantar guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kelurahan Bersih, Aman, dan Cerdas atau Kampung BANTAR adalah proyek terkenal yang dipimpin oleh Walikota Jambi Syarif Fasha, ME.

Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2017 yang berisi panduan rinci mengenai pembentukan kota bersih, aman, dan cerdas memuat rincian program tersebut. Walikota Jambi mengusulkan 109 Rukun Tetangga (RT) untuk Kampung Bantar, dan Kota Jambi menetapkan pada tahun 2015. Dengan dibantu para

Pendamping Ulama Kampung Bantar di 11 kecamatan Kota Jambi, realisasi Kampung Bantar terjadi secara bertahap, yaitu :

- a. Kec. Kota Baru dan Alam Barajo : Candro Manalu, S.P
- b. Kec. Telanaipura dan Danau Sipin : Rayhan Amadius Weihan, S.P
- c. Kec. Jambi Selatan dan Pall Merah : Abdul Rahman, S.Kom.I
- d. Kec. Jambi Timur : Ayu Kumalasari, S.Pd
- e. Kec. Jelutung : Dwi Halomowan, S.H
- f. Kec. Pelayangan : Said Ibnu Hajar, S.Pt
- g. Kec. Danau Teluk : Ahmad Sholihin Muttaqin, S.Ud
- h. Kec. Pasar Jambi : M. Anugrah Putra, S.H.³⁴

Menurut Rayhan Amadius Weihan, S.P., Asisten Kampung Bantar Kecamatan Telanaipura, Kegiatan Kampung Bantar ini diawali oleh Bapak H. Sy. Fasha, ME, Walikota Jambi, dengan maksud untuk meningkatkan taraf permukiman perkotaan.”³⁵ Instruksi dari Wali Kota Jambi yang mendukung pelaksanaan Program Kampung Bantar, memastikan koordinasi antara berbagai instansi pemerintah dan mendorong partisipasi aktif dari warga

Tujuan dari lomba ini adalah mewujudkan Kampung Bantar yang melambangkan kecerdasan, keamanan, dan kebersihan, termasuk seluruh masyarakat setempat.

³⁴ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA), 2021

³⁵ Wawancara, Ahmad Sholihin Muttaqin, S.Ud, Pendamping Kampung Bantar di Kecamatan Telanaipura, 20 Mei 2024

1. Jenis Program Kampung Bantar RT. 04

Pemerintah daerah dan masyarakat berbagi tanggung jawab untuk menjaga standar kehidupan komunal. Pemerintah dapat membuat Program Kampung Bantar yang sesuai dan dapat dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan kebutuhan unik masyarakat. Selama kurun waktu lima tahun, Pemerintah Kota Jambi telah efektif melaksanakan rencana Kampung Bantar yang bertujuan untuk mengedepankan kebersihan, keamanan, dan kecerdasan. Sebagian besar kota Jambi telah dimasukkan dalam cakupan inisiatif yang diperluas ini. Seperti program yang dilakukan RT Kampung Bantar. 04 yang digunakan adalah:

a. Bersih:

- 1) Menjaga prasarana dan fasilitas rumah yang higienis, terawat, dan mendukung kesehatan yang optimal.
- 2) Memiliki infrastruktur dan fasilitas lingkungan yang memadai.
- 3) Mendorong tingginya kesadaran kebersihan lingkungan dan keterlibatan masyarakat.
- 4) Memiliki ruang hijau yang bersih dan bebas polusi.
- 5) Memiliki kesadaran tertentu tentang penggunaan lahan subur untuk tujuan pribadi dan sosial.
- 6) Jaga kesehatan dan pastikan suasananya bersih.

- 7) Mempromosikan pola pikir kooperatif dan melestarikan cita-cita solidaritas sosial di semua lapisan masyarakat, baik nasional maupun lokal.

b. Aman:

- 1) Lingkungan yang bebas alkohol dan narkoba.
- 2) Lingkungan bebas kejahatan.
- 3) lingkungan yang bebas dari pekerja seks dan perilaku asusila.
- 4) Lingkungan yang aman dan bebas dari prasangka, perpecahan keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, dan eksploitasi anak.
- 5) Lingkungan dimana masyarakat secara rutin memelihara kebiasaan dialog musyawarah untuk mencapai mufakat dalam melaksanakan program pendidikan masyarakat, khususnya dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, keamanan, dan ketertiban.
- 6) Memiliki kesadaran menyeluruh tentang masalah hukum dan politik.
- 7) Lingkungan yang senantiasa dipelihara dan dihormati serta mematuhi konvensi sosial, persyaratan hukum, budaya nasional, dan nilai-nilai.

c. Pintar:

- 1) Mendirikan Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

- 2) Menciptakan organisasi dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan standar sumber daya manusia.
- 3) Tergabung dalam organisasi keagamaan, sosial, kemasyarakatan, dan pemuda.
- 4) Lingkungan yang bebas buta huruf dan angka putus sekolah yang tinggi.
- 5) Tempat yang bebas dari pengangguran.
- 6) Suasana bebas kematian bagi ibu hamil dan anak kecil.
- 7) Suatu lingkungan di mana penggunaan sumber daya manusia yang efisien untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat dapat dipelajari.

Dari berbagai konsep yang digagas Pemkot Jambi, penemuan andalan Kampung Bantar lah yang paling menonjol. Tujuan dari program pembangunan Kelurahan intensif terpadu, Bangkit Berdaya, dan program Kampung Bantar Bersih, Aman, Cerdas, adalah untuk secara aktif melibatkan masyarakat dalam seluruh elemen proyek, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan. Infrastruktur, fasilitas sosial, ekonomi, fisik, dan lingkungan, serta upaya kerja sama dan rasa kesatuan semuanya terkena dampak langsung dari inisiatif ini.³⁶

³⁶ Observasi, 20 Mei 2024

Salah satu Pendamping Kampung Bantar Kecamatan Telanaipura mengatakan:

“ Kampung Bantar harus memenuhi sejumlah syarat, seperti aman, cerdas, dan bersih. Bagian pertama berfokus pada kebersihan sebagai tanda keselamatan Kelurahan, yang mencakup sistem keamanan yang kuat, tidak banyak kejadian terkait narkoba, dan tidak ada warga yang terlibat kejahatan. Menyusul terciptanya keamanan masyarakat, masyarakat yang tinggal di sana harus melek huruf untuk memberantas buta huruf. Anak-anak yang sudah cukup umur untuk bersekolah harus melakukan hal tersebut.”³⁷

Pemkot akan melakukan kajian untuk memberikan insentif bagi kawasan yang akan disulap menjadi Kampung Bantar. Para pemenang akan mendapatkan penghargaan berdasarkan berbagai kategori. Menurut fasilitator dari Kampung Bantar Kecamatan Telanaipura:

" Kampung Bantar akan mendapat ucapan terima kasih dan insentif dari pemerintah kota. Kampung Bantar yang memiliki skala lingkungan sederhana dengan jumlah kepala keluarga kurang dari 50 kepala keluarga akan mendapatkan imbalan sebesar Rp 5 juta. Keluarga dengan jumlah anggota 50–99 orang menerima Rp7,5 juta sesuai skala RT. Lebih dari 100 kepala rumah tangga yang me-retweet akan menerima Rp 10 juta.³⁸

Masih menurut salah satu Pendamping Kampung Bantar Kecamatan Telanaipura mengatakan:

Hadiahnya akan dialokasikan untuk inisiatif masyarakat yang tidak dibiayai oleh pemerintah. Diperlukan persetujuan dua pertiga warga untuk pemanfaatan insentif yang dibiayai APBD. Tidak cocok untuk menangani benda berat. Misalnya saja memberikan bantuan kepada

³⁷ Wawancara, Ahmad Sholihin Muttaqin, S.Ud, Pendamping Kampung Bantar di Kecamatan Telanaipura, 20 Mei 2024

³⁸ Wawancara, Ahmad Sholihin Muttaqin, S.Ud, Pendamping Kampung Bantar di Kecamatan Telanaipura, 20 Mei 2024

individu yang sedang menghadapi kesulitan atau sedang mengalami sakit.³⁹

Saat ini, 1.600 Kelurahan sedang menjalani proses yang diperlukan untuk mendapatkan klasifikasi Kampung Bantar. Masyarakat menyambut program tersebut dengan tangan terbuka.

2. Penilaian dan Prestasi Program Kampung Bantar

Pada tanggal 17 Agustus 2018, RT 04 berpartisipasi aktif dalam memeriahkan HUT RI ke-73. Pemkot Jambi menggelar sejumlah kegiatan untuk memeriahkan acara tersebut. Lomba Kampung Bantar merupakan sumber yang sangat terpercaya. Warga seluruh kecamatan Kota Jambi, termasuk Kampung Bantar, RT 04, Kecamatan Telanaipura, termasuk di antara peserta. Lurah Telanaipura mengatakan, Lomba Kampung Bantar ini sebagai pemacu seluruh masyarakat untuk berupaya menciptakan lingkungan yang aman, cerdas, dan bersih. Hal ini sesuai dengan program pemerintah Kota Jambi.⁴⁰

Penghargaan akan diberikan kepada juara dan telah ditetapkan oleh panitia yang bertanggung jawab dalam rangka memperingati HUT RI Tahun 2018. Selain Lomba Kampung Bantar, Pemkot Jambi juga akan menyelenggarakan sejumlah turnamen lainnya. Keduanya didampingi oleh dinas/OPD yang berada di bawah lingkup Pemerintahan Kota Jambi. Selain

³⁹ Wawancara, Ahmad Sholihin Muttaqin, S.Ud, Pendamping Kampung Bantar di Kecamatan Telanaipura, 20 Mei 2024

⁴⁰ Wawancara, Sukadi, S.E, Lurah Kelurahan Telanaipura, 20 Mei 2024

kompetisi berbasis komunitas. Ketua RT. 04 menyatakan, partainya tidak mendapatkan penghargaan apa pun dalam penilaian Kampung Bantar tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2022. Terpacu semangat warga untuk memajukan Kampung Bantar agar bisa meraih kemenangan dalam kompetisi tersebut.⁴¹

Ketua RT. 04 Kelurahan Telanaipura mengatakan bahwa:

“Wilayah ini sudah masuk dalam program Kampung Bantar. Namun wilayah ini belum pernah memenangi perlombaan tersebut selama keikutsertaan dari tahun 2016 sampai tahun 2022.”⁴²

Berdasarkan evaluasi, Kampung Bantar Kota Jambi berada pada tingkatan sebagai berikut:

- a. Kampung Bantar dinilai menggunakan indikator yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Tim Penilai yang beranggotakan dari semua sektor.
- b. Kampung Bantar yang masuk nominasi kompetisi atau penilaian oleh masing-masing kecamatan dievaluasi sebagai bagian dari evaluasi Kampung Bantar Kota Jambi.
- c. Kampung Bantar mendapatkan penilaian tertinggi yaitu 2 (baik) - 1 (sedang) - 0 (buruk) setelah seluruh tim melakukan penilaian dan proses pengambilan keputusan secara menyeluruh. Keputusan Wali Kota Jambi sudah menentukan hasil akhir dan dusun akan mendapat hadiah.
- d. Walikota Jambi memberikan medali atau penghargaan kepada Kampung Bantar yang mendapat nilai tertinggi dan dinyatakan sebagai

⁴¹ Wawancara, Ardy, Sekretaris RT.04 Kelurahan Telanaipura, 20 Mei 2024

⁴² Wawancara, Ardy, Sekretaris RT.04 Kelurahan Telanaipura, 20 Mei 2024

pemenang tingkat kotamadya di Jambi. Standar berikut digunakan untuk membuat seleksi:

- 1) RT Kategori besar dengan jumlah KK > 100 di beri dana bantuan Rp.7.000.000.- (Th.2015 Rp.10.000.000,- di tambah 1 Paket Pos Kamling Rp.2.500.000.-).
- 2) RT Kategori menengah dengan jumlah KK > 60-99 diberi dana Rp.5.000.000.- (Th.2015 Rp.7.000.000.- di tambah 1 Paket Pos Kamling Rp.2.500.000.-).
- 3) RT Kategori kecil dengan jumlah KK > 40-59 di beri dana Rp.3.000.000.- (Th.2015 Rp.5.000.000.- di tambah 1 Paket Pos Kamling Rp.2.500.000.-).

Penghargaan ini juga menempatkan Kota Jambi dalam 30 besar kota dari 7.000 kabupaten/kota sedunia yang menunjukkan inovasi sosial terpuji, dengan penekanan khusus pada pelibatan dan keterlibatan masyarakat. Klaim ini cukup beralasan karena sangat sedikit contoh partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi di berbagai belahan dunia. Idealnya Kampung Bantar berkembang menjadi proyek inovatif yang sepenuhnya mewujudkan peran masyarakat. Perubahan ini juga dinilai sangat berhasil dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan fasilitas masyarakat. Hal ini dicapai melalui pelaksanaan yang tepat waktu, pemanfaatan anggaran yang efektif, dan keterlibatan masyarakat yang terlibat.

3. Evaluasi Program Kampung Bantar RT. 04

Di Kabupaten Telanaipura Kota Jambi, rencana Kampung Bantar (bersih, aman, cerdas) telah diterapkan di Kelurahan Telanaipura. Buruknya keterlibatan daerah ini mencerminkan tidak adanya partisipasi masyarakat di tempat lain. Masih banyak ketidaktahuan mengenai skema ini di kalangan masyarakat umum. Sosialisasi terhambat oleh wilayah geografis yang kecil dan padatnya penduduk. Kurangnya sosialisasi inilah yang menjadi penyebab ketidaktahuan tersebut. Rencana Kampung Bantar (bersih, aman, cerdas) belum sepenuhnya diterapkan di seluruh kecamatan dan RT Kota Jambi, menurut Pemerintah Kota Jambi.

Lurah Telanaipura, Sukadi, S.E., mengatakan bahwa Kelurahan tersebut secara aktif berupaya meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan semakin sadar akan perubahan tersebut. Dengan menekankan penghematan energi dan menerapkan teknik pengelolaan limbah yang efisien, kami ingin meningkatkan kualitas masyarakat.⁴³

Di Kampung Bantar, pengaturannya didasarkan pada metrik penting seperti keselamatan, kebersihan, dan aspek terkait lainnya. Setiap persyaratan harus dipenuhi. RT juga memiliki infrastruktur fisik yang diperlukan. Meski keempat kecamatan tersebut sudah ada, namun perlu direvitalisasi. Poskamling merupakan salah satu kecamatan tersebut. Keamanan wilayah yang ditugaskan

⁴³ Wawancara, Sukadi, S.E, Lurah Kelurahan Telanaipura, 20 Mei 2024

secara aktif dijaga oleh satu pos pemeriksaan keamanan. Meski harus diperbaiki dan dilengkapi fasilitas tambahan, namun kondisinya masih bisa diterima. Perbaikan pos keamanan di masa depan sangat penting mengingat pentingnya sinyal keamanan.⁴⁴

Realisasi Pelaksanaan Program Kampung Bantar RT. 04 Kelurahan Telanaipura adalah

- 1) Mengikuti Lomba Kampung Bantar selama tahun 2016, 2017 dan 2018, 2019 dan tahun 2022.
- 2) Meski tidak menjuarai kompetisi tersebut, namun tingkat keterlibatan masyarakat Kecamatan Telanaipura dalam kegiatan ini terus meningkat setiap tahunnya.
- 3) Dengan mengajukan permohonan ke Pemerintah Kota Jambi, warga bisa menyaksikan pelaksanaan inisiatif Kampung Bantar RT 04 Kecamatan Telanaipura.

Evaluasi lomba Kampung Bantar akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk tujuan acara tersebut, kriteria penilaian yang ditetapkan, partisipasi masyarakat, dampaknya terhadap komunitas, dan keberhasilan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Lidya Susanti sebagai staf kantor kelurahan Telanaipura mengatakan terdapat beberapa aspek yang dapat dievaluasi pada pelaksanaan lomba kampung bantar yang diikuti oleh RT.04 yaitu sebagai berikut:

⁴⁴ Observasi, 02 Maret 2021

1. Apakah tujuan dari lomba Kampung Bantar telah tercapai?

Ya, Ketua RT 04 beserta warga saat mengikuti lomba kampung bantar sudah sesuai dengan tujuan dari lomba Kampung Bantar itu sendiri yaitu untuk menjadikan suatu lingkungan perkampungan terkecil lingkup RT di masyarakat yang berwawasan lingkungan bersih dan sehat, tercukupinya fasilitas sanitasi sarana dan prasarana lingkungan memadai, permukiman layak huni dan tertata rapi (nyaman), aman dan tertib

2. Seberapa banyak masyarakat yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan acara?

Tidak begitu banyak, yang banyak terlibat persiapan dan pelaksanaan acara adalah bapak-bapak dan ibu-ibu di wilayah RT 04 setempat, untuk anak-anak muda tidak begitu terlibat, hanya sebagian kecil anak-anak muda mau mengikuti lomba kampung bantar ini.

3. Apakah terdapat unsur kreativitas dan inovasi dalam konsep dan pelaksanaan lomba?

Tidak begitu, pelaksanaan lomba yang dilakukan warga RT.04 seperti biasa melakukan gotong royong, menanam tanaman toga, melakukan senam sehat, pemeriksaan kesehatan dan mendekorasi gapura.

4. Apakah lomba tersebut berhasil menciptakan dampak positif bagi masyarakat setempat? Sangat tentu, dengan adanya pelaksanaan lomba kampung bantar ini, lingkungan sekitar RT.04 menjadi bersih dan kekompakan warga pun semakin meningkat.

5. Bagaimana anggaran yang dialokasikan untuk perlombaan kampung bantar tersebut dibandingkan dengan hasil yang dicapai? Ya tentu ada, kesesuaiannya adalah pada wilayah RT.04 menjadi lebih bersih dan gapura yang awalnya terlihat biasa saja telah diubah menjadi lebih menarik karena diberikan cat warna merah putih.⁴⁵

3.2. Kendala Dalam Pelaksanaan Kampung Bantar di Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi

Kendala pelaksanaan program kampung bantar (bersih, aman, pintar) di RT. 04 Kelurahan Telanaipura adalah:

3.2.1 Partisipasi Warga

Inovasi kini menjadi komponen krusial yang harus dimiliki para pemimpin daerah agar dapat menjalankan pemerintahannya secara efisien. Untuk melaksanakan tujuan dan sasaran organisasi secara efisien, birokrasi akan menjadi lebih kohesif dan efisien. Hal ini menggambarkan dengan sempurna situasi Pemerintah Kota Jambi saat ini. Pemerintah Kota Jambi selalu memunculkan ide-ide baru untuk mengevaluasi seberapa baik proyek berbasis masyarakatnya berjalan. Program Satu Institusi Satu Inovasi dimulai oleh Kota Jambi pada awal tahun 2015 dan mengamanatkan setiap institusi untuk menghasilkan minimal satu inovasi. Ketua RT. 04 Kecamatan Telanaipura, Jasmi, mengaku Kampung Bantar masih menghadapi kesulitan. Salah satu gambarannya adalah tidak semua warga berpartisipasi aktif dalam inisiatif ini.

⁴⁵ Wawancara, Lidya Susanti, S.P, Staf Kelurahan Telanaipura, 20 Mei 2024

Upaya pimpinan sangat penting dalam menginspirasi masyarakat untuk terlibat dalam program ini.⁴⁶

3.2.2 Anggaran Kampung Bantar

Pemerintah Kota Jambi akan memberikan reward kepada kecamatan yang efektif dalam mewujudkan kebersihan, keamanan, dan kecerdasan masyarakatnya sebagai bentuk apresiasi terhadap aktivitas Kampung Bantar di setiap kecamatan. Kelompok yang terdiri dari beberapa OPD Pemerintah Kota Jambi akan menilai lokasi Kampung Bantar. Pemerintah Kota Jambi telah menyusun beberapa peraturan yang harus dipatuhi untuk menentukan pemenang dari upaya ini.

Menurut ketua RT. 04 Kelurahan Telanaipura, karena diperlukan beberapa fasilitas, maka kegiatan di Kampung Bantar masih memerlukan biaya. Diantaranya pembuatan ruang baca, ruangan yang perlu dibangun, dan pos kamling. Dibutuhkan dana untuk membangun pos tersebut.⁴⁷

Ketua RT 04 Kecamatan Telanaipura menyatakan, meski mendapat penghargaan, namun anggaran yang dialokasikan tidak cukup untuk secara efektif meningkatkan kebersihan, keamanan, dan kecerdasan masyarakat secara adil. Alih-alih berperan sebagai sumber pendanaan pembangunan lingkungan, insentif ini mendorong warga untuk melestarikan lingkungannya.⁴⁸

⁴⁶ Wawancara, Ardy, Sekretaris RT.04 Kelurahan Telanaipura, 20 Mei 2024

⁴⁷ Wawancara, Ardy, Sekretaris RT.04 Kelurahan Telanaipura, 20 Mei 2024

⁴⁸ Wawancara, Ardy, Sekretaris RT.04 Kelurahan Telanaipura, 20 Mei 2024

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Evaluasi program Kampung Bantar (Bersih, Aman, Pintar) di RT.04 Kelurahan Telanaipura meliputi:
 - a. RT.04 Kelurahan Telanaipura sudah masuk dalam program Kampung Bantar. Namun wilayah ini belum pernah memenangi perlombaan tersebut selama keikutsertaan dari tahun 2016 sampai tahun 2022
 - b. Interaksi sosial terhambat oleh padatnya penduduk dan sedikitnya wilayah. Kurangnya sosialisasi inilah yang menjadi penyebab ketidaktahuan tersebut. Rencana Kampung Bantar (bersih, aman, cerdas) belum sepenuhnya diterapkan di seluruh kecamatan dan RT Kota Jambi, menurut Pemerintah Kota Jambi.
 - c. Hanya bapak-bapak dan ibu-ibu di wilayah RT 04 setempat yang banyak terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan lomba kampung bantar, untuk anak-anak muda tidak begitu terlibat, hanya sebagian kecil anak-anak muda mau mengikuti lomba kampung bantar ini
2. Kendala pelaksanaan program Kampung Bantar (Bersih, Aman, Pintar) di RT.04 Kelurahan Telanaipura meliputi adalah:

- a. Tingkat keterlibatan masyarakat masih rendah karena kurangnya sosialisasi dan teguran.
- b. Anggaran Kampung Bantar terkendala.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil yang diuraikan di atas, saran yang diberikan untuk penyelidikan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap warga Kelurahan Telanaipura perlu mewaspadaai Program Kampung Bantar (Pintar, Aman, dan Bersih). Pemerintah Kota Jambi meluncurkan program ini dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan.
- 2) Untuk menjamin masyarakat umum dan warga Kota Jambi mengetahui Program Kampung Bantar, maka Pemerintah Kota Jambi harus meningkatkan sosialisasinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agostiono, Evaluasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn, Rajawali Press, Jakarta, 2010
- Budi Winarno. Kebijakan Publik, Jakarta : Pt. Buku Kita, 2008
- Edy Topo Ashari dan Desi Fernanda, Membangun Pemerintahan yang Baik, (Jakarta: LAN-RI, 2001)
- Edward III, George C (edited), Public Policy Implementing, Jai Press Inc, LondonEngland. Goggin, Malcolm L et al. 1990
- John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013)
- Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta. Bayumedia, 2008,
- Purwanto dan Sulistyastuti , Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Evaluasi Kebijakan, Bumi Aksara Jakarta, 1991
- Riant Nugroho, Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin, *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986
- Sahya Anggara, Kebijakan Publik, (Bandung: Pustaka Setia, 2014)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Thei Geurts, Public Policy Making: The 21st Century Perspective, (Netherlands: Be Informed, 2011)
- V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014)
- William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Alih Bahasa: Samodra Wibawa, dkk., (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003)

Dokumentasi Pemerintah Kota Jambi, 2018

Jurnal

Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. “*Artikulasi Konsep Evaluasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*,” Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008, hlm 117

Prabawa, Hersens Nursa. Evaluasi Kebijakan Kampung Bantar di Kecamatan Paal Merah. Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 2, No. 1, Februari 2020: 33 – 44

Website

Agostiono, Evaluasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 5 September 2010

Putri, Aulia Cindy Dwi. Evaluasi Kebijakan Walikota dalam Mewujudkan Kampung Bersih Aman dan Pintar (BANTAR) di Kecamatan Kota Baru Jambi. (2019) eprints.ipdn.ac.id (dikunjungi tanggal 16 Desember 2020 : 04.52 Wib

Undang-Undang

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Pasal 1 angka 3 Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (2)

LAMPIRAN

Surat penelitian untuk Kantor Lurah Telanaipura Kota Jambi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM

Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian KM 15 Mendalo Indah, Kode Pos 36361
Telp. 082179884053, 082185048578/email:hukum@unja.ac.id/laman:law.unja.ac.id

Nomor : 2545/UN21.4/PT.01.04/2024 27 Mei 2024
Lampiran : -
Hal : Pengantar izin penelitian dan Permintaan Data Skripsi

Yth Lurah Telanaipura Kota Jambi
di
Tempat

Dengan hormat, kami mengharapkan bantuannya untuk dapat memberikan izin penelitian dan permintaan data kepada mahasiswa

Nama : Sella Alvianika PSella Alvianika P
Nomor Induk Mahasiswa : H1A117038
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Sehubungan dengan penulisan Skripsi Yang Berjudul “ **Evaluasi Pelaksanaan Program Kampung Bantar Di Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi** ” Setelah mahasiswa tersebut diatas melakukan penelitian dan permintaan data, mohon kiranya dapat mengirimkan surat kepada kami bahwa mahasiswa tersebut benar melakukan penelitian.

Demikian atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerja Sama, dan
Sistem Informasi Fakultas Hukum,



Dr. Muskibah, S.H., M.Hum.
NIP 196512041990032001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

1. UU ITE No 11 tahun 2008 pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Wawancara bersama Kelurahan Telanaipura



CURRICULUM VITAE



1. Data Diri

Nama : Sella Alvianika P
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjab Timur, 02 Agustus 1999
NIM : H1A117038
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat KTP : Jl. Tarumanegara RT 14 Kel. Tanjung Sari
Prodi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Hukum
Nomor Telepon : 089694608300
Email : sellaalvianika4@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan Formal

Periode (Tahun)	Institusi Pendidikan	Jurusan	Jenjang Pendidikan
2006-2011	SD N 13 Kota Jambi	-	6 Tahun
2011-2014	SMP N 12 Kota Jambi	-	3 Tahun
2014-2017	SMA N 2 Kota Jambi	IPS	3 Tahun
2017	Universitas Jambi	Ilmu Pemerintahan	-